

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017

Laporan
Realisasi
Anggaran

Neraca

Laporan
Operasional

Laporan
Perubahan
Ekuitas

Catatan
Atas
Laporan
Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengawali penerapannya pada tahun 2017. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2017 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2017.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 6 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - 5.2.5 Lain-Lain
 - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
 - 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO
 - 5.5 LAPORAN ARUS KAS
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
 - 5.5.5 Kenaikan/penurunan Bersih Kas
 - 5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD

- 5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
- 5.5.9 Kas di BLUD
- 5.5.10 Saldo Kas Lainnya
- 5.5.11 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
- 5.5.12 Saldo Akhir Kas

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.6.3 Koreksi-Koreksi
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

- 5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarbaru yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi. Hal ini nampak dari perkembangan PDRB Kota Banjarbaru dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2010	3.475.510.000.000	3.475.510.000.000
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013*	4.951.498.000.000	4.182.998.000.000
2014**	5.822.747.000.000	4.461.020.000.000

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*) Angka Perkiraan

**) Angka Sementara

Berdasarkan angka perkiraan oleh BPS Kota Banjarbaru, perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,65%.

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2014 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tumbuh bruto sebesar 5,82trilyun rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 4,46 trilyun rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2014 mencapai 6,65%.

Perkiraan di tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 18,74%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 8,32%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02%.

Deskripsi selengkapnyatentangperkembangankondisiekonomidi
Banjarbarudapatdilihatpadatableberikut :

Kota

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2010-2014 (dalam persen)**

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,47	2,39	3,52	4,29	3,15
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	4,79	8,26	4,35	4,08
3	Industri Pengolahan	4,54	4,30	4,36	3,71	3,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	5,64	9,67	5,22	18,74

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
5	Pengadaan Air	2,26	2,14	1,97	2,63	7,54
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,88	7,30	7,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,98	6,68	7,48	7,96	8,32
8	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,11	9,02	7,74	7,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	4,26	4,96	5,06	6,36
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,69	5,54	5,67	8,02
11	Jasa Keuangan	14,96	6,92	6,38	11,83	5,10
12	Real Estate	5,46	6,99	6,02	7,10	6,98
13	Jasa Perusahaan	4,36	7,73	5,37	7,39	7,02
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,98	7,63	5,96	5,83	5,55
15	Jasa Pendidikan	4,42	3,58	5,01	7,02	7,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	7,87	7,06	9,08	6,22
17	Jasa Lainnya	5,21	5,75	3,27	2,81	8,01
Total PDRB		5,85	5,99	6,54	6,58	6,65

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2010-2014 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 5,85% dan meningkat menjadi 5,99% pada tahun 2011, meningkat kembali sebesar 6,54% untuk tahun 2012, meningkat kembali sebesar 6,58% untuk tahun 2013 dan selanjutnya menjadi 6,65% hingga tahun 2014.

2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya semakin menurun. Penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian lain-lain penerimaan yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang

telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya, yaitu dengan cara: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Belanja Daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Program-program dan kegiatan-kegiatan pada pengeluaran Belanja Daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Kebijakan Umum Keuangan Daerah dari Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- a. Perencanaan belanja daerah dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dengan menggunakan asas efisiensi dan efektivitas;
- c. Belanja tidak langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Belanja langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atas dasar kebutuhan nyata dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pengawasan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Sebelumnya Belanja APBD Kota Banjarbaru diklasifikasikan berdasarkan bidang dan sub bidang. Adapun sisi pendapatan tidak mengalami perubahan. Sejak diterbitkannya Permendagri tersebut di atas maka sisi belanja APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan serta diklasifikasikan menurut fungsi.

Belanja Urusan Wajib terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan Hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Pemberdayaan Perempuan
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- m. Sosial
- n. Tenaga Kerja
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- p. Penanaman Modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan Olah Raga
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- t. Pemerintahan Umum
- u. Ketahanan Pangan
- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- w. Kearsipan
- x. Komunikasi dan Informatika
- y. Perpustakaan

Adapun Belanja Urusan Pilihan terdiri dari :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumber Daya mineral
- d. Pariwisata
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian

Klasifikasi Belanja tersebut di atas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut Program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja tidak terduga

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal terjadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah maka terjadi surplus atau defisit APBD. Dalam hal terjadi surplus diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Selanjutnya dalam hal defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan daerah tentang Pelaksanaan APBD 2015 dan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2015.
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga).

Pada tahun anggaran 2015, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk

memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dan cadangan.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Pada tahun anggaran 2015, pengeluaran pembiayaan direncanakan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) di masa yang akan datang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat di atas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya, kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintah Kota Banjarbaru

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
DINAS KESEHATAN				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.100.514.542,00	1.771.205.070,00	84.32
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.286.000,00	4.905.000,00	92.79
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	103.929.554,00	51.96
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	13.200.000,00	91.67
	Penyediaan alat tulis kantor	59.512.000,00	59.512.000,00	100,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	134.512.500,00	123.681.000,00	91.95
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.802.771,00	23.713.897,00	99.63
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	156.315.000,00	131.333.500,00	84.02
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	473.436.271,00	461.710.119,00	97.52
	Penyediaan Jasa Non PNS	1.029.950.000,00	845.920.000,00	82.13
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.319.044.999,00	1.093.001.891,00	82.86
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	252.616.000,00	204.270.000,00	80.86
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	149.920.000,00	112.484.000,00	75.03
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	157.999.000,00	129.460.000,00	81.94
	Pengadaan mebelair	310.870.000,00	268.170.000,00	86.26
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	320.809.999,00	314.570.000,00	98.05
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	35.000.000,00	22.155.225,00	63.30
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.980.000,00	37.692.666,00	55.45
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.550.000,00	1.140.000,00	10.81
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.850.000,00	3.060.000,00	31.07
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	3.450.000,00	0,00	0.00
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.870.000,00	15.120.000,00	80.13
	Pembinaan Jabatan Fungsional	18.870.000,00	15.120.000,00	80.13
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	298.509.050,00	285.978.200,00	95.80
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.360.000,00	37.627.000,00	98.09
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	29.497.500,00	29.379.500,00	99.60
	Sistem Manajemen Dan Informasi Kesehatan	203.099.000,00	191.899.150,00	94.49
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	27.552.550	27.072.55,00	98.26
05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	420.207.500,00	346.867.500,00	82.55
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	420.207.500,00	346.867.500,00	82.55
06	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.062.742.850,00	14.291.812.199,00	94.88
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	9.280.000.000,00	9.280.000.000,00	100,00
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	385.450.850,00	237.169.393,00	61.54
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	482.410.000,00	477.474.799,00	98.98
	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	1.187.965.000,00	1.179.940.942,00	99.32
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	3.726.967.000,00	3.117.227.065,00	83.64
07	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.635.555.435,00	2.228.137.492,00	84.54
	Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat	445.992.835,00	422.922.092,00	94.83
	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2.189.562.600,00	1.805.215.400,00	82.45

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
08	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	365.745.605,00	298.743.616,00	81.68
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Status Gizi Masyarakat	365.745.605,00	298.743.616,00	81.68
09	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	637.888.000,00	559.217.738,00	87.67
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air	66.764.000,00	65.502.538,00	98,11
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	320.343.000,00	260.566.000,00	81.34
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU & TPM	115.466.000,00	114.785.000,00	99.41
	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	59.540.000,00	47.690.000,00	80.10
	Percepatan IPKM	39.664.000,00	39.663.200,00	100.00
	Peningkatan Pelayanan krisis kesehatan akibat wabah/bencana	36.111.000,00	31.011.000,00	85.88
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	247.506.300,00	176.413.008,00	71.28
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	125.673.300,00	83.736.500,00	66.63
	Fasilitasi Penanggulangan AIDS	121.833.000,00	92.676.508,00	76.07
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.019.940.000,00	840.942.865,00	82.45
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	91.720.000,00	43.154.900,00	47.05
	Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	442.110.000,00	375.146.932,00	84.85
	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	486.110.000,00	422.641.033,00	86.94
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.280.465.000,00	4.144.105.555,00	96.81
	Pelayanan Keluarga Kurang Mampu	4.280.465.000,00	4.144.105.555,00	96.81
13	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	10.484.147.976,00	1.381.030.375,00	99.02
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas	10.484.147.976,00	1.381.030.375,00	99.02
14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9.342.457.488,00	7.144.401.987,00	76.47
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	4.916.819.438,00	3.852.151.656,00	78.35
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.694.965.000,00	3.031.311.198,00	82.04
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (JAMKESMAS)	93.784.050,00	36.155.050,00	38.55
	Sosialisasi dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	168.042.000,00	105.705.000,00	62.90
	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	468.847.000,00	119.079.083,00	25.40
15	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	822.649.450,00	739.196.650,00	89.86
	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan	268.484.100,00	220.108.100,00	81.98
	Peningkatan Pendidikan Formal	126.251.800,00	107.160.000,00	84.88
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Kesehatan	265.857.950,00	254.357.950,00	95.67
	Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas	107.855.600,00	104.440.600,00	96.83
	Penelitian dan Pengembangan Masalah Kesehatan	54.200.000,00	53.130.000,00	98.03
16	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Dan	771.575.300,00	554.755.500,00	71.90

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Anak			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	584.245.500,00	387.347.000,00	66.30
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	70.216.700,00	64.414.100,00	91.74
	Peningkatan Pelayanan KB	63.463.100,00	51.177.600,00	80.64
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	53.650.000,00	51.816.800,00	96.58
17	Program Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit	1.048.814.000,00	891.683.875,00	85.02
	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	94.495.000,00	62.721.000,00	66.37
	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	163.585.000,00	121.136.000,00	74.05
	Pembinaan Imunisasi Dan Peningkatan Surveillans	355.113.000,00	341.455.875,00	96.15
	Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	284.551.000,00	245.762.000,00	86.37
	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	151.070.000,00	120.609.000,00	79.84
PUSKESMAS BANJARBARU UTARA				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	265.627.000,00	237.009.946,00	89.23
	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	900.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.200.000,00	27.639.946,00	63.98
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	23.968.000,00	99.87
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	14.832.000,00	98.88
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.020.000,00	56.67
	Penyediaan makanan dan minuman	121.167.000,00	109.710.000,00	90.54
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	12.140.000,00	95.14
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94.350.000,00	77.479.500,00	82.12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	24.925.000,00	99.70
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.350.000,00	43.184.500,00	72.76
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	4.470.000,00	89.40
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	4.900.000,00	98.00
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	300.302.600,00	243.108.700,00	80.95
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	300.302.600,00	243.108.700,00	80.95
PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.662.900,00	237.232.217,00	89.64
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	900.000,00	60.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.980.000,00	46.896.317,00	82.30
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	18.635.000,00	18.635.000,00	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.173.500,00	18.173.500,00	99.89
	Penyediaan peralatan dan	25.829.400,00	25.829.400,00	100.00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	perlengkapan kantor			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100.00
	Penyediaan makanan dan minuman	113.985.000,00	103.950.000,00	91.20
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	6.068.000,00	47.55
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.764.000,00	76.251.800,00	70.11
	Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000,00	14.821.000,00	98.81
	Pengadaan mebalair	30.595.000,00	29.095.000,00	95.10
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44.169.000,00	29.490.000,00	66.77
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	1.155.000,00	23.10
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.000.000,00	1.690.000,00	18.78
	Pemeliharaan gedung kantor	5.000.000,00	0,00	0.00
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	323.960.000,00	244.741.340,00	75.55
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	323.960.000,00	244.741.340,00	75.55
04	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.433.433.626,00	872.000.779,00	60.83
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (JKN) BLUD	1.433.433.626,00	872.000.779,00	60.83
PUSKESMAS SUNGAI BESAR				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.125.000,00	154.933.508,00	86.98
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	540.000,00	27.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.200.000,00	32.175.508,00	94.08
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	5.400.000,00	37.50
	Penyediaan alat tulis kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	11.375.000,00	94.79
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	870.000,00	48.33
	Penyediaan makanan dan minuman	67.965.000,00	67.605.000,00	99.47
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	6.068.000,00	47.55
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	6.300.000,00	75.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.875.000,00	86.233.000,00	98.13
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.775.000,00	45.773.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.600.000,00	3.960.000,00	86.09
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	6.500.000,00	86.67
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	242.503.300,00	176.493.794,00	72.78
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	242.503.300,00	176.493.794,00	72.78
PUSKESMAS CEMPAKA				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.774.000,00	141.561.495,00	92.06
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.749.000,00	1.350.000,00	77.19
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	31.113.695,00	92.60
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	11.497.000,00	95.81

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000,00	8.366.300,00	98.43
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.250.000,00	5.982.500,00	95.72
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.080.000,00	60.00
	Penyediaan makanan dan minuman	61.515.000,00	60.614.000,00	98.54
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	5.958.000,00	46.69
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.327.000,00	51.015.185,00	79.31
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.927.000,00	46.865.185,00	79.63
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.400.000,00	4.150.000,00	76.85
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	558.685.000,00	511.273.100,00	91.51
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	558.685.000,00	511.273.100,00	91.51
04	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.552.840.447,00	1.059.145.217,00	68.21
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (JKN) BLUD	1.552.840.447,00	1.059.145.217,00	68.21
PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	152.854.000,00	134.578.506,00	88.04
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000,00	23.961.406,00	88.75
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	19.712.300,00	98.56
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	9.778.000,00	97.79
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100.00
	Penyediaan makanan dan minuman	57.144.000,00	49.218.000,00	86.13
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	5.958.000,00	46.69
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.576.500,00	86.085.090,00	70.23
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.250.000,00	16.925.000,00	92.74
	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.000.000,00	14.200.000,00	88.75
	Pengadaan mebelair	8.250.000,00	8.250.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.550.000,00	9.550.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.426.500,00	26.310.090,00	45.82
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.600.000,00	3.825.000,00	68.30
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	7.025.000,00	93.67
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	403.649.250,00	314.357.045,00	77.88
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	403.649.250,00	314.357.045,00	77.88
PUSKESMAS LANDASAN ULIN				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	216.0969.179,00	176.752.981,00	81.79
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	34.800.000,00	28.105.513,00	80.76

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	daya air dan listrik			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.707.000,00	24.707.000,00	100.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.749.179,00	7.371.468,00	84.25
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100.00
	Penyediaan makanan dan minuman	80.280.000,00	64.911.000,00	80.86
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	5.958.000,00	46.69
	Penyediaan Jasa Non PNS	16.800.000,00	7.700.000,00	45.83
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.800.000,00	127.664.312,00	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.750.000,00	7.642.000,00	98.61
	Pengadaan mebelair	75.000.000,00	71.702.000,00	95.60
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.550.000,00	35.070.312,00	82.42
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.500.000,00	13.250.000,00	71.62
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	257.920.200,00	218.786.619,00	84.83
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	257.920.200,00	218.786.619,00	84.83
PUSKESMAS LIANG ANGGANG				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250.556.500,00	209.528.984,00	83.63
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000,00	32.080.484,00	76.38
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	14.994.000,00	99.96
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.750.000,00	8.140.000,00	93.03
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.306.500,00	11.146.500,00	98.58
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.312.500,00	72.92
	Penyediaan makanan dan minuman	133.440.000,00	111.487.500,00	83.55
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	6.068.000,00	47.55
	Penyediaan Jasa Non PNS	16.800.000,00	15.600.000,00	92.86
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.582.500,00	46.919.253,00	56.82
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.500.000,00	15.250.000,00	98.39
	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.500.000,00	2.000.000,00	57.14
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.982.500,00	19.291.753,00	38.60
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.100.000,00	0,00	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	7.377.500,00	98.37
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	279.663.950,00	183.980.545,00	65.79
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	279.663.950,00	183.980.545,00	65.79
PUSKESMAS SUNGAI ULIN				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143.245.300,00	126.697.745,00	88.45
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.500.000,00	17.884.445,00	79.49

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	17.037.300,00	16.922.300,00	99.33
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.125.000,00	9.375.000,00	92.59
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.275.000,00	9.275.000,00	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	1.080.000,00	72.00
	Penyediaan makanan dan minuman	53.322.500,00	49.367.500,00	92.58
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.760.000,00	6.068.000,00	47.55
	Penyediaan Jasa Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.967.500,00	212.076.897,00	85.87
	Pembangunan gedung kantor	40.900.000,00	40.525.000,00	99.08
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.800.000,00	54.450.000,00	97.58
	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	100.00
	Pengadaan mebelair	50.140.000,00	48.110.000,00	95.95
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.500.000,00	30.500.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.717.500,00	22.936.897,00	48.07
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	1.190.000,00	23.80
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.800.000,00	1.255.000,00	33.03
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	610.000,00	610.000,00	100.00
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	363.236.200,00	273.376.525,00	75.26
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	363.236.200,00	273.376.525,00	75.26
UPTD GUDANG OBAT				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136.223.800,00	134.899.104,00	99.03
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.080.000,00	1.080.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.238.800,00	23.914.104,00	94.75
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.832.000,00	7.832.000,00	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100.00
	Penyediaan makanan dan minuman	24.915.000,00	24.915.000,00	100.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.758.000,00	7.758.000,00	100.00
	Penyediaan Jasa Non PNS	38.400.000,00	38.400.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.361.200,00	34.557.632,00	95.04
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.563.000,00	27.759.432,00	93.90
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.548.200,00	4.548.200,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	100.00
PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.236.000,00	194.843.640,00	93.12

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	100.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.000.000,00	32.607.640,00	69.38
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	100.00
	Penyediaan alat tulis kantor	21.100.000,00	21.100.000,00	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	
	Penyediaan makanan dan minuman	71.386.000,00	71.386.000,00	100.00
	Penyediaan Jasa Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.742.500,00	20.961.000,00	54.10
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.242.500,00	16.391.000,00	49.31
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.200.000,00	2.270.000,00	70.94
03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	252.017.500,00	222.468.050,00	88.27
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	252.017.500,00	222.468.050,00	88.27

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan pendapatan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp 76.500.000,00 atau sebesar 306%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp 17.000.000,00 realisasi pendapatan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 9.500.000,00 atau sebesar 28,57%.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan sebesar Rp 216.727.379.711,00 dan terrealisasi sebesar Rp 205.102.715.058,00 atau sebesar 94,64%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 376.106.738.723,00 yang realisasi sebesar Rp. 345.466.280.728,00 atau sebesar 91,85%, maka pada tahun ini mengalami peningkatan realisasi belanja sebesar 3%.

Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

No	Program Dan Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.507.585,00	941.686.595,00	86,67
	- Penyediaan jasa surat menyurat	1.998.000,00	1.626.000,00	81,38
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.800.000,00	89.711.817,00	70,20
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100
	- Penyediaan alat tulis kantor	19.000.000,00	10.050.549,00	52,90
	- Penyediaan barang cetak dan pengadaan	14.000.000,00	12.604.000,00	90,03
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.499.550,00	11.155.671,00	76,94
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.992.000,00	4.992.000,00	100
	- Penyediaan makanan dan minuman	184.603.500,00	154.574.500,00	83,73
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	364.774.535,00	302.132.058,00	82,83
	- Penyediaan Jasa Non PNS	324.840.000,00	324.840.000,00	100
2.	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	5.717.957.995,00	4.419.739.012,00	77,30
	- Pembangunan gedung kantor	783.805.480,00	743.416.480,00	94,85
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	46.010.000,00	39.751.000,00	86,40
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	232.220.000,00	212.777.230,00	91,63
	- Pengadaan mebeleur	65.750.000,00	61.507.250,00	93,35
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	300.000.000,00	208.997.500,00	69,67
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.044.374.515,00	2.975.752.961,00	73,58
	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	32.000.000,00	21.369.300,00	66,78
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.798.000,00	143.230.291,00	72,78

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	5.785.000,00	82,64
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	7.152.000,00	71,52
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.425.550,00	55.040.200,00	65,19
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja target realisasi kinerja SKPD	29.143.400,00	21.683.700,00	74,40
	- Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	41.282.200,00	20.382.500,00	49,37
	- Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	13.999.950,00	12.974.000,00	92,67
4.	Program Pembangunan Jalandan Jembatan	36.224.354.093,00	33.651.680.500,00	92,90
	- Pembangunan jalan	17.826.635.643,00	17.733.741.500,00	99,48
	- Pembangunan jembatan	8.838.890.250,00	7.871.351.500,00	89,05
	- Pembangunan jalan (DAK)	9.558.828.200,00	8.046.587.500,00	84,18
5.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	38.325.070.500,00	37.669.671.700,00	98,28
	- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.556.076.225,00	6.516.861.600,00	99,40
	- Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan	4.894.898.600,00	4.774.372.600,00	97,55
	- Normalisasi drainase jalan kota	16.219.368.657,00	15.889.459.500,00	97,97
	- Pembangunan drainase jalan kota	6.515.567.118,00	6.491.969.000,00	99,64
	- Pemeliharaan rutin drainase jalan kota	4.139.159.900,00	3.996.649.000,00	96,56
6.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	80.974.883.519,00	78.143.354.100,00	96,50
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	11.100.092.125,00	11.002.267.400,00	99,12
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	3.219.245.918,00	3.213.539.400,00	99,82
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	10.457.172.846,00	9.815.580.000,00	93,86
	- Perbaikan jalan lingkungan	3.266.130.500,00	3.215.304.900,00	98,44
	- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	3.072.499.480,00	2.967.874.000,00	96,59
	- Peningkatan jalan lingkungan	53.859.742.650,00	47.928.788.400,00	96,13
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	288.680.465,00	113.669.210,00	39,38
	- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	232.863.115,00	98.000.000,00	42,09
	- Pengendalian dan uji mutu	55.817.350,00	15.668.600,00	28,07
8.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	13.417.831.648,00	12.324.291.542,00	91,85
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	4.754.567.522,00	4.742.521.346,00	99,75
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	8.663.264.126,00	7.581.770.196,00	87,52
9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.180.807.905,00	3.110.604.700,00	97,79
	- Perencanaan dan Penataan RTH	3.180.807.905,00	3.110.604.700,00	97,79
10.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	13.936.411.825,00	13.201.494.000,00	94,73
	- Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya	7.075.756.200,00	6.508.804.000,00	91,99
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya	6.860.655.625,00	6.692.690.000,00	97,55
11.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	3.725.955.600,00	2.972.592.231,00	79,78
	- Pembangunan Fasilitas Umum	419.572.000,00	351.327.000,00	83,73
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala	3.306.383.600,00	2.621.265.231,00	79,28

Fasilitas Umum				
12.	Program Penyediaan Air Minum	9.923.438.326,00	9.090.073.300,00	91,60
	- Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	3.806.949.000,00	3.204.804.500,00	84,18
	- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.362.512.726,00	4.250.095.700,00	97,42
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	1.735.248.000,00	1.628.720.500,00	93,86
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18.728.600,00	6.452.600,00	34,45
13.	Program Penyediaan Air Limbah	4.369.980.000,00	4.330.047.100,00	99,09
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1.218.360.000,00	1.192.965.100,00	97,92
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	2.192.900.000,00	2.183.373.000,00	99,57
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	958.720.000,00	953.709.000,00	99,48
14	Program Perencanaan Tata Ruang	328.514.000,00	301.087.000,00	91,65
	- Revisi Rencana Tata Ruang	328.514.000,00	301.087.000,00	91,65
15	Program Pemanfaatan Ruang	454.488.400,00	384.958.000,00	84,70
	- Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	139.180.600,00	107.168.200,00	77,00
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	103.553.800,00	82.776.300,00	79,94
	- Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	211.754.000,00	195.013.500,00	92,09
16.	Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	62.466.300,00	51.710.500,00	82,78
	- Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	42.466.400,00	31.868.500,00	75,04
	- Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	19.999.900,00	19.842.000,00	99,21

3.2 Hambatan/Kendala/Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja adalah terlambatnya penetapan APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan Perubahan APBD sangat terbatas yang berakibat terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi perhatian dan diharapkan dimasa yang akan datang perubahan anggaran dapat dilaksanakan lebih awal sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di SKPD-SKPD.

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru hingga mencapai 306% disebabkan karena adanya alat alat berat yang baru serta telah disetujuinya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

3.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

3.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

3.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

3.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

3.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayaratas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
 - d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

3.3.7 **Pengukuran Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

3.3.8 **Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

3.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

3.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembalian keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

3.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

3.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

3.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

3.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2017

(Rp)

76.500.000,00

31 Desember 2016

(Rp)

17.000.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	25.000.000,00	76.500.000,00	306,00	17.000.000,00
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
TOTAL		25.000.000,00	76.500.000,00	306,00	17.000.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2017

(Rp)

76.500.000,00

31 Desember 2016

(Rp)

17.000.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah	25.000.000,00	76.500.000,00	306,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
4	Lain-Lain PAD yang Sah			
TOTAL		25.000.000,00	76.500.000,00	306,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2017

(Rp)

76.500.000,00

31 Desember 2016

(Rp)

17.000.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum			
2	Jasa Usaha	25.000.000,00	76.500.000,00	306,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
TOTAL		25.000.000,00	76.500.000,00	306,00

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2017

(Rp)

76.500.000,00

31 Desember 2016

(Rp)

18.750.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	76.500.000,00	306,00
3	Retribusi Terminal			
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
5	Retribusi Tempat Pariwisata			
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
TOTAL		25.000.000,00	76.500.000,00	306,00

Tabel 5.1.1.1.1.1 Daftar Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru (Rp)

Tanggal	No. STS	Uraian	Nilai STS
21 Maret 2017	01/SAB/DPU&PR /2017	Sewa Alat Berat Tandem Roller 4 ton, Pekerjaan Patching Jalan, Lokasi sekitar jalan lap. Murjani, Mentaos, oprit Jembatan Guntung Lua Banjarbaru, selama 1 hari. An. Mahar Siyamuddin	750.000,00
23 Maret 2017	02/SAB/DPU&PR /2017	Sewa Alat Aspal Cutter, Pekerjaan Pemoangan aspal jalan, di jalan Peramuhan Ujung Landasan Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Robbi	250.000,00
27 Maret 2017	03/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi jalan menuju Makam Mahabbah Sei. Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Mahar Siyamuddin	750.000,00
30 Maret 2017	04/SAB/DPU&PR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan	750.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

	/2017	perumahan di lokasi Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Fathul Habir	
	05/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat backhoe loader, pekerjaan pengerukan jalan perumahan di lokasi Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Fathul Habir	1.500.000,00
	06/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat stamper kuda, pekerjaan patching jalan di lokasi Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar, selama 1 hari. an. Deni	200.000,00
19 April 2017	07/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pemadatan timbunan jalan di lokasi sungai sipai martapura, selama 1 hari. an. Bahtiar Rifa'i	750.000,00
27 April 2017	08/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat vibratory tandem roller 8 ton, pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Bapelkes Banjarbaru, selama 1 hari. an. H. Sukri	550.000,00
29 Mei 2017	09/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan, lokasi Desa Gunung Sawi Kec. Astambul Martapura selama 4 hari	1.500.000,00
	10/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 6 ton, pekerjaan pemadatan jalan lokasi Hotel Ratu Elok Sei. Besar selama 1 hari. An. Hj. MARIATY, SE	375.000,00
12 Juni 2017	11/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat asfalt cutter pekerjaan pemotongan aspal jalan lokasi Jl. Zam zam jailani, Jl. Jati, Jl. Kartini Kel. Kemuning Banjarbaru selama 2 hari. An. PT. Ridho Bersama Batulicin	500.000,00
15 Juni 2017	12/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat backhoe loader, pekerjaan meratakan jalan di lokasi Jl. Jurusan Pelaihari km.23 kel. Landasan Ulin Selatan Banjarbaru, selama 4 hari. an. PT. Citra Prima Utama	6.000.000,00
7 Juli 2017	13/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Jl. H. Umar Padang Panjang Mandiangin selama 1 hari. an. Mahar	750.000,00
	14/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Jl. Sulaiman Mandiangin selama 3 hari. an. Mahar	2.250.000,00
21 Juli 2017	15/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Jl. Jafri Zam-zam Banjarbaru selama 1 hari. an. Mahar	750.000,00
27 Juli 2017	16/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal jalan di lokasi Komp. Banua Permai Kel. Sungai Besar Banjarbaru selama 2 hari. an. CV. RPB Arya Perkasa	500.000,00
21 Agustus 2017	17/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Jl. Saptamarga Gt. Payung Banjarbaru selama 4 hari. an. PT. Asyraf jp	3.000.000,00
	18/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat pemotong aspal, pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Jl. Saptamarga Gt. Payung Banjarbaru selama 3 hari. an. PT. Asyraf jp	750.000,00
29 Agustus 2017	19/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat cutter pekerjaan pemotongan aspal jalan di lokasi Komp. Griya Lambung Mangkurat Kel. Cempaka Banjarbaru. an. Cv. Budi Karya	500.000,00
30 Agustus 2017	20/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Upt Trans Gunung Kupang Cempaka Banjarbaru selama 4 hari. an. Cv. Taj'mila	3.000.000,00
14 September 2017	21/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat jack hammer, pekerjaan menghancurkan lantai jembatan di lokasi Komplek Sumber Indah Banjarbaru selama 2 hari. an. Cv. Saptamarga Lestari	500.000,00
25 September 2017	22/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Komp. Perumahan Trikora Land. Ulin Banjarbaru selama 6 hari. an. Abd Basit	4.500.000,00
18 Oktober 2017	23/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat backhoe loader, pekerjaan penggalian atau penanaman pohon di lokasi Jl. Mistar Cokrokusumo Banjarbaru selama 20 hari. an. Fathul Habir	30.000.000,00
26 Oktober 2017	24/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan Jl. Kurnia 1 & 2, Jl. Makmur, Jl. Kurihing, Jl. Kaplingan, Jl. Gg. Tebu Land. Ulin Utara an. PT. Arafat Generation Tri	7.500.000,00
	25/SAB/DPU&PR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan,	1.500.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

	/2017	LandasanUlin Utara, selama 2 hari an. Mahar S.	
6 November 2017	26/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat asfalt cutter, pek. pemotongan aspal, di lokasi Kel. Kemuning selama 2 hari. an. PT. Ridho BB	500.000,00
	27/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat backhoe loader, pek. meratakan lahan, di Perumahan Citra Garden City. an. Cv. Kambang Culan	1.500.000,00
8 November 2017	28/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan pemadatan tanah di halaman parkir kantor Walikota Banjarbaru, selama 2 hari. an. PT. Kondang Buana Asri	750.000,00
15 November 2017	29/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan di Kelapa Sawit 8 Banjarbaru, selama 2 hari. an. Nasir	750.000,00
21 November 2017	30/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat pemotong aspal, pekerjaan pemotongan aspal, di Jl. Kasturi 2 Kel. Syamsuddin Noor Landasan Ulin Banjarbaru selama 1 hari. an. Sugiarto	250.000,00
28 November 2017	31/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan, lokasi di Jl. Budi Waluyo, selama 2 hari an. Rakhmat tri Suprayogi	1.500.000,00
8 Desember 2017	32/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan pemadatan oprit Jembatan di Guntung Paikat Banjarbaru, selama 2 hari. an. Irfan Fitari	750.000,00
19 Desember 2017	33/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan di Danau Seran Guntung Manggis Banjarbaru, selama 2 hari. an. Murhan	750.000,00
22 Desember 2017	34/SAB/DPU&PR /2017	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan dan meratakan halaman di Eks RSUD Banjarbaru, selama 1 hari. an. M. Fatchurrahman	375.000,00
		T O T A L	76.500.000,00

Terdapat denda keterlambatan penyeteroran Sewa Alat Berat sebesar Rp. 580.000,00

**Rekap Denda Keterlambatan Penyeteroran Sewa Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	SPK Nomor : 680/01/SPK/DPU&PR/2017, Sewa Alat Berat Tandem Roller 4 ton, Pekerjaan Patching Jalan, Lokasi sekitar jalan lap. murjani, mentaos, oprit jembatan gantung lua Banjarbaru, selama 1 hari. An. mahar siyamuddin, Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl 9 feb. 2017 disetor ke kas daerah tgl 21 Maret 2017	15.000,00
2.	SPK Nomor : 680/02/SPK/DPU&PR/2017, Sewa Alat Asfalt Cutter, Pekerjaan Pemotongan aspal jalan, di jalan peremuan ujung landasan ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. Robbi. Nilai Kotrak Rp. 250.000,- yaitu tgl. 23 Feb. 2017 disetor ke kas daerah tgl. 23 Maret 2017	5.000,00
3.	SPK Nomor : 680/03/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi jalan menuju makam mahabbah Sei. Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Mahar Siyamuddin. Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl.7 Maret 2017 disetor ke kas daerah tgl. 27 Maret 2017	15.000,00
4.	SPK Nomor : 680/04/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan perumahan di lokasi jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Fathul Habir. Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl. 17 Maret 2017 disetor ke kas daerah tgl. 30 Maret 2017	15.000,00
5.	SPK Nomor : 680/05/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat Backhoe Loeder, pekerjaan pengerukan jalan perumahan di lokasi jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru, selama 1 hari. an. Fathul Habir. Nilai kontrak Rp. 1.500.000,- yaitu tgl. 17 Maret 2017 disetor ke kas daerah tgl. 30 Maret 2017	30.000,00
6.	SPK Nomor : 680/06/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat stamper kuda, pekerjaan patching jalan di lokasi Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar, selama 1 hari. an. Deni. Nilai kontrak Rp. 200.000,- yaitu tgl. 17 Maret 2017 disetor ke kas daerah tgl. 30 Maret 2017	4.000,00
7.	SPK Nomor : 680/07/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pemadatan timbunan jalan di lokasi Sungai Sipai Martapura, selama 1 hari. an. Bahtiar Rifa'i Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl. 6 April 2017 disetor ke kas daerah tgl. 19 April 2017	15.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

8.	SPK Nomor : 680/08/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat vibratory tandem roller 8 ton, pekerjaan pengaspalan jalan di Bapelkes Banjarbaru, selama 1 hari. an. H. Sukri. Nilai kontrak Rp. 550.000,- yaitu tgl. 18 April 2017 disetor ke kas daerah tgl. 27 April 2017	11.000,00
9.	SPK Nomor : 680/09/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Desa Gunung Sawi Kec. Astambul Martapura, selama 4 hari. an. Abd. Muis. Nilai kontrak Rp. 1.500.000,- yaitu tgl. 16 s/d 19 Mei 2017 disetor ke kas daerah tgl. 29 Mei 2017	30.000,00
10.	SPK Nomor : 680/11/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal jalan di lokasi Jl. Zam zam Jailani, Jl. Jati, Jl. Kartini kel. Kemuning Banjarbaru, selama 2 hari. an. PT. Ridho Bersama Batulicin . Nilai kontrak Rp. 500.000,- yaitu tgl. 30 & 31 Mei 2017 disetor ke kas daerah tgl. 12 Juni 2017	10.000,00
11.	SPK Nomor : 680/12/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat Backhoe Loader, pekerjaan meratakan Jalan dilokasi jalan jurusan Pelaihari km.23 Kel. land. Ulin Selatan Banjarbaru, selama 4 hari. an. PT. Citra Prima Utama. Nilai kontrak Rp. 6.000.000,- yaitu tgl. 07 & 10 Juni 2017 disetor ke kas daerah tgl. 15 Juni 2017	120.000,00
12.	SPK Nomor : 680/13/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi jl. h. umar padang panjang mandiangan selama 1 hari. an. Mahar. Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl. 16 Juni 2017 disetor ke kas daerah tgl. 07 Juli 2017	15.000,00
13.	SPK Nomor : 680/14/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi jl. sulaiman mandiangan selama 3 hari. an. Mahar. Nilai kontrak Rp. 2.250.000,- yaitu tgl. 19 s/d 21 Juni 2017 disetor ke kas daerah tgl. 07 Juli 2017	45.000,00
14.	SPK Nomor : 680/15/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi jl. jafri zam-zam banjarbaru selama 1 hari. an. Mahar. Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl. 19 Juli 2017 disetor ke kas daerah tgl. 21 Juli 2017	15.000,00
15.	SPK Nomor : 680/17/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi jl. saptamarga gt. payung banjarbaru selama 4 hari. an. pt. asyraf jp. Nilai kontrak Rp. 3.000.000,- yaitu tgl. 27 s/d 30 Juli 2017 disetor ke kas daerah tgl. 21 Agustus 2017	60.000,00
16.	SPK Nomor : 680/18/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat pemotong aspal, pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi jl. saptamarga gt. payung banjarbaru selama 3 hari. an. pt. asyraf jp. Nilai kontrak Rp. 750.000,- yaitu tgl. 31 Juli s/d 02 Agustus 2017 disetor ke kas daerah tgl. 21 Agustus 2017	15.000,00
17.	SPK Nomor : 680/19/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat asfalt cutter pekerjaan pemotongan aspal jalan dilokasi Komp. Griya lambung mangkurat kel. cempaka Banjarbaru selama 2 hari. an. CV Budi Karya. Nilai kontrak Rp. 500.000,- yaitu tgl. 18 s/d 19 Agustus 2017 disetor ke kas daerah tgl. 29 Agustus 2017	10.000,00
18.	SPK Nomor : 680/20/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi UPT. Trans Gunung Kupang Cempaka Banjarbaru selama 4 hari. an. CV. Tajmila. Nilai kontrak Rp. 3.000.000,- yaitu tgl. 25,26& 28,29 Agustus 2017 disetor ke kas daerah tgl. 30 Agustus 2017	60.000,00
19.	SPK Nomor : 680/22/SPK/DPU&PR/2017, Sewa alat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan di lokasi Komp. Perumahan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru selama 6 hari. an. Abd. Basit. Nilai kontrak Rp. 4.500.000,- yaitu tgl. 12 s/d 17 September 2017 disetor ke kas daerah tgl. 25 September 2017	90.000,00
	TOTAL	580.000,00

5.1.2 Belanja

31 Desember 2017

(Rp)

205.102.715.058,00

31 Desember 2016

(Rp)

345.466.280.728,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	17.273.735.665,00	15.251.489.825,00	88,29	13.495.913.377,00
2	Belanja Modal	199.453.644.046,00	189.851.225.233,00	95,19	331.970.367.351,00
3	Belanja Tidak Terduga				
TOTAL		216.727.379.711,00	205.102.715.058,00	94,64	345.466.280.728,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2017

(Rp)

15.251.489.825,00

31 Desember 2016

(Rp)

13.495.913.377,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.674.106.000,00	4.403.590.368,00	94,21
2	Belanja Barang dan Jasa	6.625.569.665,00	4.950.924.357,00	74,72
3	Hibah	5.974.060.000,00	5.896.975.100,00	98,71
4	Bantuan Sosial			
5	Bantuan Keuangan			
TOTAL		17.273.735.665,00	15.251.489.825,00	94,64

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.309.206.000,00	3.085.849.118,00	93,25
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.316.400.000,00	1.269.641.250,00	66,45
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH			
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
5	Belanja Penghasilan Lainnya			
6	Honorarium PNS	48.500.000,00	48.100.000,00	99,18
7	Honorarium Non PNS			
8	Uang Lembur			
9	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
10	Belanja Honorarium Non Pegawai			
11	Belanja Pegawai Operasional BLUD			
TOTAL		4.674.106.000,00	4.403.590.368,00	94,21

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	232.649.600,00	164.984.457,00	70,92
2	Belanja Bahan/Material			
3	Belanja Jasa Kantor	266.117.000,00	188.853.817,00	70,97
4	Belanja Premi Asuransi			
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	325.511.115,00	156.284.264,00	48,01
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.784.400,00	95.076.800,00	90,74
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
9	Belanja Sewa Alat Berat			
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor			
11	Belanja Makanan dan Minuman	293.518.500,00	215.295.500,00	73,35
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
13	Belanja Pakaian Kerja	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
15	Belanja Perjalanan Dinas	392.854.535,00	311.772.058,00	79,36
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			
18	Belanja Pemeliharaan	4.361.374.515,00	3.197.687.461,00	73,32
19	Belanja Jasa Konsultasi	327.420.000,00	300.130.000,00	91,67
20	Belanja Honorarium Non PNS	312.840.000,00	312.840.100,00	100
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
22	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya			
TOTAL		6.625.569.665,00	4.950.924.357,00	74,72

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Uang/Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	5.974.060.000,00	5.896.975.100,00	98,71
TOTAL		5.974.060.000,00	5.896.975.100,00	98,71

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp)

(Rp)

189.851.225.233,00

331.970.367.351,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	352.823.750,00	320.439.580,00	90,82
3	Belanja Gedung dan Bangunan	7.721.638.985,00	6.840.576.111,00	88,59
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.179.181.311,00	182.492.709.542,00	95,46
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75
6	Belanja Aset Lainnya			
TOTAL		199.453.644.046,00	189.851.225.233,00	95,19

5.1.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	6.500.000,00	4.685.400,00	72,08
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu			
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin			
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin			
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	2.343.750,00	1.718.700,00	73,33
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan			
9	Belanja Mdl Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan			
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor			
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.010.000,00	39.751.000,00	86,41

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	167.020.000,00	159.108.248,00	95,26
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	65.750.000,00	61.507.250,00	93,55
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	65.200.000,00	53.668.982,00	82,31
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar			
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran			
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan			
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium			
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah			
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			
25	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api			
26	Belanja Modal Pengadaan Amunisi			
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan			
28	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit			
TOTAL		352.823.750,00	320.439.580,00	90,82

5.1.2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.721.638.985,00	6.840.576.111,00	88,59
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan			

4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu			
TOTAL		7.721.638.985,00	6.840.576.111,00	88,59

5.1.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	103.537.021.444,00	99.143.215.700,00	95,76
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	12.058.136.168,00	11.084.830.900,00	91,93
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.075.756.200,00	6.495.709.000,00	91,80
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.754.567.522,00	4.742.521.346,00	99,75
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana	45.185.726.125,00	44.361.041.700,00	98,18
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	8.663.264.126,00	7.581.770.196,00	87,52
7	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	9.904.709.726,00	9.083.620.700,00	91,71
TOTAL		191.179.181.311,00	182.492.709.542,00	95,46

5.1.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75
TOTAL		200.000.000,00	197.500.000,00	98,75

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2017

(Rp)

0

31 Desember 2016

(Rp)

0

5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2017

(Rp)

0

31 Desember 2016

(Rp)

0

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja				
Surplus/Defisit					

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan :

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
2	Pencairan Dana Cadangan			
TOTAL				

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Penyertaan Modal pada Bank			
2	Penyertaan Modal pada PDAM			
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua			
TOTAL				

5.1.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2017

(Rp)

0

31 Desember 2016

(Rp)

0

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja				
3	Surplus (Defisit)				
4	Pembiayaan Netto				
SILPA					

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayaratas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
 - d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan padan kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk pembangunan set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk pembangunan aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap *ATB* dilakukan amortisasi kecuali atas *ATB* yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap *ATB* yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk *ATB* berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

4.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

4.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

4.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

4.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

5.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 998.076.016.338,39 dan Rp 927.902.247.778,39. Saldo Aset per 31 Desember 2017 naik sebesar Rp 70.173.768.560,00 atau sebesar 7,56% dari Saldo Aset per 31 Desember 2016. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.2.1 Aset Lancar

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
--------------------------	--------------------------

5.2.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
--------------------------	--------------------------

5.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
--------------------------	--------------------------

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Catatan
No.Rek 011.00.04.00226.8	0,00	0,00	(Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

5.2.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
--------------------------	--------------------------

5.2.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.6 Kas Lain-lain

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.7 Investasi Jangka Pendek

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.8 Piutang Pajak

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.9 PiutangRetribusi

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.9.1 PenyisihanPiutangRetribusi

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.10PiutangPendapatanAsli Daerah Lainnya

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.10.1 PenyisihanPiutangPendapatanLainnya yang Sah

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.11PiutangBagiHasilProvinsi

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.12BagianLancarTuntutanGantiRugi

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

5.2.1.13 Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2017
(Rp)

31 Desember 2016
(Rp)

5.2.1.14 Persediaan

31 Desember 2017
(Rp)
7.562.926.200,00

31 Desember 2016
(Rp)
7.557.876.200,00

(Rp)

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Alat Tulis Kantor	2.837.550,00	2.323.800,00
Barang yang akan di Serahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.672.808.500,00	7.555.552.400,00
Jumlah	7.675.646.050,00	7.557.876.200,00

Tabel 5.2.1.14 Daftar Persediaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

No	Jenis Barang	Saldo 31 Desember 2016	Persediaan Masuk	Persediaan Keluar	Sisa Per 31 Desember 2017	Harga Satuan	Jumlah
A.	ALAT TULIS KANTOR						
1.	Kertas A4	10	48	48	10	30.500	305.000
2.	Map Kertas Biasa	220	752	935	37	500	18.500
3.	Tinta Reffil e-Print 100 ml	-	66	60	6	35.000	210.000
4.	Odner Bantex	3	230	230	3	18.000	54.000
5.	Odner Bantex Blueberry	-	5	1	4	28.000	112.000
6.	Odner Bantex Lilac	-	10	5	5	28.000	140.000
7.	Odner Bantex Plast Melon	-	5	2	3	28.000	84.000
8.	Materai 3000	-	355	344	11	3.000	33.000
9.	Kertas Kop Dinas	3	25	26	2	100.000	200.000
10.	Amplop Dinas Coklat	-	400	208	192	450	86.400
11.	Lampu Led Philips 9w	12	15	26	1	73.900	73.900
12.	Lampu Led Philips 10.5w	-	16	9	7	75.900	531.300
13.	Lampu Led Eco 11w	-	5	-	5	39.900	199.500
14.	Lampu Led Eco 9w	-	5	2	3	32.900	98.700
15.	Kabel NYM 2x1.5 Spring	-	50	-	50	5.575	278.750
16.	Fitting Tempel	7	10	7	10	14.500	145.000
17.	Stop Kontak IB Ellegra	5	10	5	10	15.500	155.000
18.	Saklarga IB Broco	4	5	4	5	22.500	112.500

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2017

Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor	2.837.550
-------------------------------------	-----------

No	Jenis Barang	Saldo 31 Desember 2016	Persediaan M asuk	Persediaan K eluar	Sisa Per 31 Desember 2017	Harga Satuan	Jumlah
B. Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ke Tiga							
Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah							
1.	Pembuatan Toilet Umum Pongpes Miftahu Falah Kel. Sungai Besar (Paket 1)	-	1	-	1	224.237.119	224.237.119
2.	Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Paikat (Paket 2)	-	1	-	1	180.344.416	180.344.416
3.	Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 3)	-	1	-	1	173.483.515	173.483.515
4.	Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 4)	-	1	-	1	172.968.515	172.968.515
5.	Pembuatan Toilet Umum Kel. Sungai Tiung	-	1	-	1	168.713.515	168.713.515
6.	Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Manggis (Paket 6)	-	1	-	1	226.218.020	226.218.020
7.	Perencanaan Teknis Air Limbah TA. 2018	-	1	-	1	47.000.000	47.000.000
Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)							
1.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kec. Cempaka	-	1	-	1	338.182.500	338.182.500
2.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Sungai Tiung	-	1	-	1	338.269.500	338.269.500
3.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Bangkal	-	1	-	1	301.305.000	301.305.000
4.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Palam	-	1	-	1	301.355.000	301.355.000
5.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Timur	-	1	-	1	301.387.000	301.387.000
6.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Tengah	-	1	-	1	301.267.000	301.267.000
7.	Pembuatan Septictank Komunal Rumah MBR Kel.	-	1	-	1	301.367.000	301.367.000

	LandasanUlin Utara						
Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum							
1.	Pembangunan SumurBordanJaringan Perpipaan 2,5 liter/detikPonpesWara satulFuqahaKel. Kemuning	-	1	-	1	289.002.244	289.002.244
2.	Pembuatan Tower dengantangkipe nemp ungan Air Bersih SDN LUB 4 danPembuatanTandon Air denganHidrantUmum rt.02/02 KelLandasanUlin Barat	-	1	-	1	93.734.973	93.734.973
3.	Pembangunan SumurBordanJaringan Perpipaan 5 liter/detikMisbahulM unirKel. LandasanUlin Utara	-	1	-	1	521.795.783	521.795.783
Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah							
1.	PerencanaanTeknis Air Limbah 2017	-	1	-	1	47.970.000	47.970.000
2.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. Sungai Ulin	-	1	-	1	203.970.540	203.970.540
3.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. GuntungPaikat	-	1	-	1	203.070.540	203.070.540
4.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. LandasanUlin Utara	-	1	-	1	201.470.540	201.470.540
5.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. Sungai Tiung	-	1	-	1	203.270.540	203.270.540
6.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. Bangkal	-	1	-	1	203.270.540	203.270.540
7.	PembuatanWC+Septi ctankKomunalRumah MBR Kel. Palam	-	1	-	1	202.470.540	202.470.540
8.	Pembuatan Toilet Umum MasjidLandasanUlin Selatan MBR Kel. LandasanUlin Selatan	-	1	-	1	202.070.540	202.070.540
9.	Pembuatan Toilet UmumPonpesWaliSo ngo Putra Kel. GuntungManggis	-	1	-	1	202.670.540	202.670.540
10.	PembuatanTangkiSep tikKomunalRumah	-	1	-	1	200.970.540	200.970.540

	MBR Kel. Cempaka						
11.	Pembuatan Toilet Umum MasjidPalamKel. Palam	-	1	-	1	198.770.540	198.770.540
Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah							
1.	PembuatanWC+SeptictankKomunalRumah MBR Kec. Banjarbaru Utara	-	1	-	1	70.905.346	70.905.346
2.	PembuatanWC+SeptictankKomunalRumah MBR Kec. Cempaka	-	1	-	1	206.335.827	206.335.827
3.	PembuatanWC+SeptictankKomunalRumah MBR Kec. Liang Anggang	-	1	-	1	207.235.827	207.235.827
4.	PembuatanWC+SeptictankKomunalRumah MBR Rt.34 Rw.11 Kel. Sungai Tiung	-	1	-	1	120.432.040	120.432.040
5.	Pembuatan WC Rumah MBR Rt.01 Kel. Palam	-	1	-	1	119.896.040	119.896.040
6.	Pembuatan WC Rumah MBR Kel. LandasanUlin Utara	-	1	-	1	119.421.280	119.421.280
7.	Pembuatan WC Rumah MBR Rt. 24 & 25 Kel. Cempaka	-	1	-	1	119.590.040	119.590.040
8.	Pembuatan WC + SeptictankKomunalR umah MBR Rt. 2 & 3 Rw. 06 Kel. LandasanUlinTimur	-	1	-	1	119.882.040	119.882.040
9.	Pembuatan WC Rumah MBR Kel. LandasanUlin Tengah	-	1	-	1	119.371.280	119.371.280
10.	Pembuatanwcrumah MBR Kel. Bangkal	-	1	-	1	119.132.280	119.132.280
JumlahBarang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ke Tiga							7.672.808.500

5.2.2 InvestasiJangkaPanjang

31 Desember 2017
(Rp)

31 Desember 2016
(Rp)

5.2.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2017
(Rp)

31 Desember 2016
(Rp)

=====

5.2.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2017
(Rp)

31 Desember 2016
(Rp)

=====

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

4.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp)

(Rp)

998.076.016.338,39

927.902.247.778,39

Komponen Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2016
Tanah	366.526.022.154,00	354.649.615.012,00
PeralatandanMesin	5.908.378.738,75	5.272.813.015,00
GedungdanBangunan	11.064.321.625,00	7.271.488.375,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.246.932.106.164,65	1.075.355.984.915,71
Aset Tetap Lainnya	7.634.840.604,00	4.365.602.691,00
KonstruksidalamPengerjaan	11.123.529.619,00	00
Akumulasi Penyusutan	(651.113.182.067,01)	(537.937.565.499,32)
Aset Tetap	998.076.016.338,39	927.902.247.778,39

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	354.649.615.012,00	366.526.022.154,00	11.876.407.142,00	3,35
PeralatandanMesin	5.272.813.015,00	5.908.378.738,75	635.565.723,75	12,05
GedungdanBangunan	7.271.488.375,00	11.064.321.625,00	3.792.833.250,00	52,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.075.355.984.915,71	1.246.932.106.164,65	171.576.121.248,94	15,96
Aset Tetap Lainnya	4.365.602.691,00	7.634.840.604,00	3.269.237.913,00	74,89
KonstruksidalamPengerjaan	18.924.309.269,00	11.123.529.619,00	-7.800.780.150,00	(14,22)
Akumulasi Penyusutan	(537.937.565.499,32)	(651.113.182.067,01)	(113.175.616.567,69)	21,04
Jumlah Aset Tetap	927.902.247.778,39	998.076.016.338,39	70.173.768.560,00	7,56

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1	Saldo per 31 Desember 2016	354.649.615.012,00	5.272.813.015,00	7.271.488.375,00	1.075.355.984.915,71	4.365.602.691,00	18.924.309.269,00
2	Koreksi Kurang	-	6.770.000,00	-	22.507.336,00	78.000,00	-
3	Koreksi Tambah	4.099.916.771,00	360.307.159,00	109.470.000,00	3.640.484.000,00	33.013.000,00	-
4	Saldo Awal 2017 (1 - 2 + 3)	358.749.531.783,00	5.626.350.174,00	7.380.958.375,00	1.078.973.961.579,71	4.398.537.691,00	18.924.309.269,00
5	Penambahan Tahun 2017					-	-
	a. Belanja Modal 2017	-	320.439.580,00	6.840.576.111,00	182.492.709.542,00	197.500.000,00	-
	b. Belanja Pegawai 2017	-	-	-	-	-	-
	c. Belanja Barang Jasa 2017	-	-	-	-	-	-
	d. BOP/BOS /BOMM	-	-	-	-	-	-
	e. Hibah	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
	f. Penambahan KDP	-	-	-	-	-	-
	g. Mutasi Tambah	8.625.317.151,00	-	7.021.662.145,00	11.853.472.124,00	3.038.802.913,00	11.123.259.119,00
	Jumlah Penambahan (a s/d g)	8.625.317.151,00	320.439.580,00	13.862.238.256,00	194.346.181.660,00	3.236.302.913,00	11.123.259.119,00
6	Pengurangan						
	a. Pengurangan KDP	-	-	-	-	-	-
	b. Non Aset	-	-	164.890.000,00	727.650.588,00	-	-
	c. 5 %	-	-	-	-	-	-
	d. Ekstra/BBA	-	25.154.100,00	-	-	-	-
	e. Penghapusan	848.826.780,00	-	-	5.664.408.941,06	-	-
	f. Pengembangan Belanja	-	-	-	-	-	-
	g. Reklas ke RB	-	13.256.915,25	-	-	-	-
	h. Mutasi SKPD	-	-	7.271.488.375,00	-	-	-
	i. Mutasi antar KIB	-	-	2.742.496.631,00	19.995.977.552,00	-	18.924.309.269,00
	Jumlah Pengurangan (a s/d g)	-	38.411.015,25	10.178.875.006,00	20.738.656.290,00	-	18.924.309.269,00
7	Saldo per 31 Desember 2017 (4 + 5 - 6)	366.526.022.154,00	5.908.378.738,75	11.064.321.625,00	1.246.932.106.164,65	7.634.840.604,00	11.123.529.619,00

5.2.2.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas/Badan/Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.366.526.022.154,00 dan Rp.354.649.615.012,00 Saldo Tanah per 31 Desember Tahun 2017 tersebut meningkat sebesar Rp.11.876.407.142,00 atau 3,35% dari total aset Tanah per 31 Desember tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>366.526.022.154,00</u>	<u>354.649.615.012,00</u>

No.	URAIAN	TANAH
1.	Saldo Awal 2016	354.649.615.012,00
2.	Mutasi + (Perubahan Organisasi)	4.099.916.771,00
3.	Saldo Awal 2017	358.749.531.783,00
4.	Reklass Antar KIB :	
	KIB C	669.777.400,00
	KIB D	7.955.539.751,00
	Penghapusan	848.826.780,00

No.	URAIAN	TANAH
5.	Saldo Akhir 2017	366.526.022.154,00

A. Penambahan Aset Tetap-Tanah Mutasi Tambah (Perubahan Organisasi) Tahun 2016 sebesar Rp4.099.916.771,00

Rincian Mutasi Tambah (Perubahan Organisasi)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Al Munawarah	874.438.031,00
2.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Al Munawarah	289.079.894,00
3.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Al Munawarah	365.411.262,00
4.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Al Munawarah	598.790.000,00
5.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Embung Lukudat	133.520.000,00
6.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Embung Lukudat	601.804.800,00
7.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Embung Lukudat	251.440.000,00
8.	Pengadaan/Pembelian Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Al Munawarah	985.432.784,00
Total		4.099.916.771,00

B. Penambahan Aset Tetap-Tanah Reklass Antar KIB Tahun 2017 sebesar Rp. 8.625.317.151,00

Rincian Reklass Antar KIB

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	KIB C :	669.777.400,00
	Pengadaan/Pembelian lahan RTH Al Munawarah (5 Sertifikat)	
2.	KIB D :	
	- Pengadaan tanah fasum untuk daerah resapan air/Embung Liang Anggang	1.437.148.000,00
	- Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Baru Penghubung Panglima Batur – Karang Anyar	6.518.391.751,00
Total		8.625.317.151,00

C. Pengurangan Aset Tetap-Tanah Penghapusan Tahun 2017 sebesar Rp. 848.826.780,00

Rincian Penghapusan Tahun 2017

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jalan Lingkar Utara	19.715.000,00
2.	Jalan Laos	43.252.000,00
3.	Jalan Depnaker	27.169.240,00
4.	Jalan Rajawali	362.240.000,00
5.	Jalan Tegal Arum Belakang	104.028.480,00
6.	Jalan Sempati	179.840.160,00
7.	Jalan Tegal Arum	46.332.000,00

8.	Jalan Guntung Damar	66.249.900,00
Total		848.826.780,00

5.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp.5.908.378.738,75** dan **Rp.5.272.813.015,00**. Terjadi Kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp.635.565.723,75 atau 12,05% dari total Peralatan dan Mesin tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017
(Rp)
5.908.378.738,75

31 Desember 2016
(Rp)
5.272.813.015,00

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	Saldo Awal 2016	5.272.813.015,00
2.	Koreksi - Catat	6.770.000,00
3.	Mutasi + Perubahan Organisasi	360.307.159,00
4.	Saldo Awal 2017	5.626.350.174,00
5.	Belanja Modal	320.439.580,00
6.	Total Belanja Modal	5.946.789.754,00
7.	Extra 2017	25.154.100,00
8.	Reklass Antar KIB (Rusak Berat)	13.256.915,25
9.	Saldo Akhir 2017	5.908.378.738,75

- A. Pengurangan Aset Koreksi Kurang Catat Pada Peralatan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp6.770.000,00 yaitu berupa Concrete Vibrator**
- B. Penambahan Aset Mutasi Tambah Perubahan Organisasi sebesar Rp.360.307.159,00 yang terdiri dari :**

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1.	02.03.01.01.03	Staion Wagon	142.650.000,00
2.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	6.000.000,00
3.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	17.122.000,00
4.	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	33.600.000,00
5.	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	7.080.000,00
6.	02.04.03.07.10	Scanner	1.245.000,00
7.	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-	1.750.000,00

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
		16)	
8.	02.06.01.05.47	LCD Proyektor	3.000.000,00
9.	02.06.01.05.47	LCD Proyektor	9.500.000,00
10.	02.06.02.06.23	Tustel	2.373.000,00
11.	02.06.02.06.23	Tustel	1.475.000,00
12.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	8.400.000,00
13.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	8.400.000,00
14.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	8.500.000,00
15.	02.06.03.02.02	Lap Top	11.800.000,00
16.	02.06.03.02.02	Lap Top	12.500.000,00
17.	02.06.03.02.02	Lap Top	12.442.900,00
18.	02.06.03.02.03	Note Book	11.550.000,00
19.	02.06.03.04.09	Plotter	46.600.000,00
20.	02.06.03.05.03	Printer	1.500.000,00
21.	02.06.03.05.03	Printer	1.469.259,00
22.	02.06.03.05.03	Printer	1.400.000,00
23.	02.06.03.05.03	Printer	4.100.000,00
24.	02.06.03.05.03	Printer	5.850.000,00
Jumlah Penambahan Mutasi Tambah Perubahan Organisasi Aset Peralatan dan Mesin			360.307.159,00

C. Penambahan Belanja Modal terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp320.439.580,00

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
1.	02.04.03.08.24	Panasonic / 1 Pk	5.500.000,00
2.	02.04.03.08.24	Panasonic / 1 Pk	5.500.000,00
3.	02.04.03.08.24	LG	3.178.000,00
4.	02.06.01.04.01	Informa / -	4.495.500,00
5.	02.06.01.04.01	Lion	18.350.000,00
6.	02.06.01.04.04	Informa / -	2.500.000,00
7.	02.06.02.03.03	Mollar Profesional / MLR-GT435	4.675.000,00
8.	02.06.02.04.01	LG	2.198.000,00
9.	02.06.02.05.15	Sanken / HWD 895 SUV	2.400.000,00
10.	02.06.02.05.15	Sanken / HWD 895 SUV	2.400.000,00
11.	02.06.02.05.15	Sanken / HWD 895 SUV	2.400.000,00
12.	02.06.02.06.03	Samsung / 40 Inch	5.750.000,00
13.	02.06.02.06.03	Samsung / 40 Inch	5.750.000,00
14.	02.06.03.02.01	Lenovo / FOD4005MID	12.306.435,40

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
15.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0D4005MID	12.306.435,40
16.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0D4005MID	12.306.435,40
17.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0D4005MID	12.306.435,40
18.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0D4005MID	12.306.435,40
19.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0CM000CID	18.488.035,50
20.	02.06.03.02.01	Lenovo / F0CM000CID	18.488.035,50
21.	02.06.03.02.02	ASUS / ASUSPRO	13.400.000,00
22.	02.06.03.02.02	ASUS / ASUSPRO	13.400.000,00
23.	02.06.03.02.02	ASUS / ASUSPRO	13.400.000,00
24.	02.06.03.02.02	ASUS / ASUSPRO	13.400.000,00
25.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma MX 497	1.499.535,00
26.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma MX 497	1.499.535,00
27.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma MX 497	1.499.535,00
28.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma MX 497	1.499.535,00
29.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma MX 497	1.499.535,00
30.	02.06.03.04.08	Canon / Epson L310	2.050.905,50
31.	02.06.03.04.08	Canon / Epson L310	2.050.905,50
32.	02.06.03.04.08	Canon / Epson L310	2.050.905,50
33.	02.06.03.04.08	Canon / Epson L310	2.050.905,50
34.	02.06.03.04.08	Canon / Pixma Pro-1	10.492.685,00
35.	02.06.04.01.05	Active / 1 Biro	1.822.500,00
36.	02.06.04.01.05	Active / 1 Biro	1.822.500,00
37.	02.06.04.01.05	Active / 1 Biro	1.822.500,00
38.	02.06.04.01.06	Active / 1/2 Biro	1.518.750,00
39.	02.06.04.01.06	Active / 1/2 Biro	1.518.750,00
40.	02.06.04.01.06	Active / 1/2 Biro	1.518.750,00
41.	02.06.04.03.05	Putar	3.500.000,00
42.	02.06.04.03.06	Putar	1.944.000,00
43.	02.06.04.03.06	Putar	1.944.000,00
44.	02.07.01.01.52	ICA / CE 1200	1.400.000,00
45.	02.07.01.01.52	ICA / CE 1200	1.400.000,00
46.	02.07.01.01.52	ICA / CE 1200	1.400.000,00
47.	02.07.01.01.52	ICA / CE 1200	1.400.000,00
48.	02.07.01.01.52	ICA / CE 1200	1.400.000,00
49.	02.10.05.01.04	Invinity	27.475.000,00
50.	02.02.02.03.02	Cutter	4.269.600,00
51.	02.04.02.11.03	Rol Meter	261.600,00
52.	02.04.02.11.03	Rol Meter	325.000,00
53.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	404.300,00
54.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	727.800,00

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
55.	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18.750.000,00
56.	02.09.01.06.67	Concrete Hammer Test	415.800,00
Jumlah Belanja Modal Tahun 2017			320.439.580,00

D. Pengurangan Extra Terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp. 25.154.100,00

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1.	02.02.02.03.02	Cutter	4.269.600,00
2.	02.04.02.11.03	Rol Meter	261.600,00
3.	02.04.02.11.03	Rol Meter	325.000,00
4.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	404.300,00
5.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	727.800,00
6.	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18.750.000,00
7.	02.09.01.06.67	Concrete Hammer Test	415.800,00
Jumlah Pengurangan Extra Pada Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2017			25.154.100,00

E. Pengurangan Reklass Antar KIB (Rusak Berat) Terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp. 13.256.915,25

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1.	02.04.03.08.24	Air Conditioning Unit	3.400.000,00
2.	02.06.03.04.08	Printer	4.850.000,00
3.	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
4.	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
5.	02.06.03.04.08	Printer	2.006.915,25
Jumlah Pengurangan Extra Pada Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2017			13.256.915,25

5.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp. 11.064.321.625,00** dan **Rp. 7.271.488.375,00** terjadi Penambahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 3.792.833.250,00** atau sebesar 52,16 % dari total aset Gedung dan Bangunan tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
11.064.321.625,00	7.271.488.375,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Saldo Awal 2016	7.271.488.375,00
2.	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2017	6.840.576.111
	b. Reclass Dari KIB F	7.021.662.145
	c. Mutasi Tambah Perubahan SOPD	109.470.000
3.	Jumlah Penambahan	13.971.708.256,00
4.	Pengurangan :	
	a. Retensi 5%	
	b. Non Aset	164.890.000,00
	c. Mutasi Antar SKPD	7.271.488.375,00
	d. Reclass Ke KIB	2.742.496.631,00
5.	Jumlah Pengurangan	10.178.875.006,00
6.	Saldo Akhir 2017	11.064.321.625,00

A. Penambahan Belanja Modal terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp 6.840.576.111,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru (KDP 2016)	536.797.480,00
2.	Pemagaran Tanah Jl Panglima Batur dan Pangeran Suriansyah Ujung Komet	127.970.000,00
3.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Wella Mandiri Syamsuddin Noor	223.470.000,00
4.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Kehutanan Wanabhakti Sungai Besar	139.570.000,00
5.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Putri Regency Landasan Ulin Utara	193.120.000,00

6.	Pembangunan RTH Lingkungan Taman Palam Megatama Guntung Manggis	223.420.000,00
7.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar	223.470.000,00
8.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin	223.587.000,00
9.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar	167.664.000,00
10.	Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara	223.571.000,00
11.	Pembangunan Sistem jaringan penyiraman tanaman RTH Al Munawarah	489.901.000,00
12.	Pembuatan Toilet Umum Mesjid Agung Al Munawarah Banjarbaru Komet	185.870.000,00
13.	Pembuatan Pendopo Disabilitas Tuna Netra Banjarbaru Guntung Manggis	202.670.000,00
14.	Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru	351.327.000,00
15.	Rehabilitasi Plafon Pasar Cempaka Kel Cempaka	206.870.000,00
16.	Pembuatan papan mini billboard informasi ruang	183.712.000,00
17.	Pembuatan papan himbauan informasi ruang	30.200.000,00
18.	Pengadaan /pembelian lahan Ruang Terbuka Hijau Al Munawarah (5 sertifikat 1.358 m2)	669.777.400,00
19.	Perencanaan teknis master plan /Desain RTH Embung Lokudat Guntung Payung	49.565.000,00
20.	Rehabilitasi Atap Mesjid Agung Al Munawarah Kota Banjarbaru Kel Kemuning	1.815.515.231,00
21.	Pembangunan gedung serbaguna Kel Sei Tiung	49.199.000,00
22.	Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin	157.420.000,00
23.	Honor Alat olah raga lainnya (Fitnes Outdoor)	1.020.000,00
24.	Pembersihan Tenda Membran Structure Warung Minggu Raya	82.370.000,00
25.	Pemeliharaan rutin ruang terbuka Hijau (reklas)	82.520.000,00
	Total Belanja Modal Tahun 2017	6.840.576.111,00

- B. Adanya Penambahan Reklas Antar KIB Atas Aset Tetap-Gedungan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp7.021.662.145,00 yaitu Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru**
- C. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 109.470.000,00 berupa Baliho Berkonstruksi**
- D. Pengurangan Non Aset Tahun 2017 Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 164.890.000,00**

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Pembersihan Tenda Membran Structure Warung Minggu Raya	82.370.000,00
2.	Pemeliharaan rutin ruang terbuka Hijau (reklas)	82.520.000,00
	Jumlah Pengurangan Non Aset Tahun 2017	164.890.000,00

- E. Pengurangan Mutasi Antar SKPD Tahun 2017 Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7.271.488.375,00**

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Depo Arsip Pemerintah Kota Banjarbaru	1.643.848.375,00
2.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Kemuning	796.793.500,00
3.	Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru	4.410.836.500,00
4.	Rehabilitasi Gor Rudy Resnawan Kota Banjarbaru	212.455.551,00
5.	Rehabilitasi Tangga dan lantai Mesjid agung Al Munawwarah	207.554.449,00
	Jumlah Mutasi Antar SKPD Tahun 2017	7.271.488.375,00

F. Pengurangan Reklass Antar KIB Tahun 2017 Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp. 2.742.496.631,00 terdiri dari :

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	KIB A :	
	Pengadaan /pembelian lahan Ruang Terbuka Hijau Al Munawwarah (5 sertifikat 1.358 m2)	669.777.400,00
2.	KIB E :	
	Perencanaan teknis master plan /Desain RTH Embung Lokudat Guntung Payung	49.565.000,00
	Pembangunan gedung serbaguna Kel Sei Tiung	49.199.000,00
	Honor Alat olah raga lainya (Fitnes Outdoor)	1.020.000,00
	Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin	157.420.000,00
3.	KIB F :	
	Rehabilitasi Atap Mesjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru Kel Kemuning	1.815.515.231,00
	Jumlah Pengurangan Non Aset Tahun 2017	2.742.496.631,00

5.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp.1.246.932.106.164,65** dan **Rp.1.075.355.984.915,71** terjadi Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp 171.576.121.248,94 atau sebesar 15,96% dari total aset jalan, irigasi, dan Jaringan tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

(Rp)

1.246.932.106.164,65

(Rp)

1.075.355.984.915,71

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2016	1.075.355.984.915,71
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2017	182.492.709.542,00
	b. Koreksi Tambah Catat 2016	3.640.484.000,00
	c. Reclass Dari KIB F	11.853.472.124,00
3	Jumlah Penambahan	197.986.665.666,00
4	Pengurangan :	
	a. Koreksi Kurang Catat 2016	22.507.336,00
	b. Non Aset 2017	727.650.588,00
	c. Penghapusan 2017	5.664.408.941,00
	d. Reclass Ke KIB A	7.955.539.751,00
	e. Reclass Ke KIB E	2.732.423.913,00
	f. Reclass Ke KIB F	9.308.013.888,00
5	Jumlah Pengurangan	26.410.544.417,00
6	Saldo Akhir 2016	1.246.932.106.164,71

A. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp182.492.709.542,00 terdiri dari :

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Sumber Sari, Jl Unlam III menuju Sumber Sari, Jl Bina Marga, Jl Gaharu, Jl Kemuning, Jl Warga Tunggal, Jl Nusantara (pkt 3)	196.518.277,00
2.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Karang Anyar II, Jl Dharma Koesuma, Jl Al Manar, Jl Sukarelawan (pkt 2)	1.835.742.741,00
3.	Pengaspalan Jl Darul Hijrah dan Jl Pondok Labu	124.269.574,00
4.	Rehabilitasi Jalan Gotong Royong (Syamsuddin Noor), Jl Airbus/ Angkasa(Syamsuddin Noor), Jl Sidomulyo Raya (LU Timur). Jl Sidomulyo Selatan (LU Timur), Jl Ponpes Miftahul Munir(LU Utara), Jl Harapan Jaya (GT Manggis) (pkt 1)	499.550.970,00
5.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Al Manar	145.399.497,00
6.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Sukarelawan	375.410.311,00
7.	Pelebaran Jalan Barjad Lok Utara	3.882.986.131,00
8.	Pembangunan jalan UPT Trans Kel Cempaka	1.804.057.194,00
9.	Pengaspalan Jl Jdr Sudirman	9.693.553,00
10.	Pengaspalan Jl Husni Thamrin	6.198.733,00
11.	Rehabilitasi Jl Alternatif Trans	846.880.595,00
12.	Pengaspalan Dr Sutomo Barat	8.550.554,00
13.	Rehabilitasi Jl Mujahidin	76.961.059,00
14.	Pengaspalan Jl agus salim barat	50.293.014,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	URAIAN	NILAI (Rp)
15.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Pangeran Suriansyah Ujung	1.417.628.525,00
16.	Perkerasan dan plat beton Jl Kahayan	40.095.520,00
17.	Pengaspalan Jl. Seledri	327.958.486,00
18.	Pembangunan jalan peramuhan Ujung (lanjutan) LU tengah)	4.732.290.982,00
19.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Raya	822.061.772,00
20.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Selatan	435.581.322,00
21.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Warga Tunggal	269.888.249,00
22.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Gaharu	185.724.137,00
23.	Pengaspalan Jl rosella	83.182.896,00
24.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Mawar	1.364.618.289,00
25.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Teratai	414.814.466,00
26.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl. Mawar Utara	134.607.223,00
27.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Sumber Sari	1.242.130.351,00
28.	Pengaspalan Jl Petai	62.165.515,00
29.	Pengaspalan Jl Sinar Baru	112.564.376,00
30.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Unlam 3 menuju Sumber Sari	28.178.842,00
31.	Pembangunan Jl. Tambak Langsung (lanjutan) Syamsudin Noor	2.578.683.112,00
32.	Rehabilitasi Jl Sapta Marga	2.587.529.930,00
33.	Perkerasan dan Plat Beton (Patching) Jl. Guntung Manggis	2.564.617.726,00
34.	Rehabilitasi Jl Kuburan Muslimin Bangkal	797.612.546,00
35.	Pengaspalan Jl Citra Menjalin Kel Sei Tiung	206.272.040,00
36.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal	884.705.456,00
37.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl Kemuning	621.141.215,00
38.	Perbaikan jalan lingkungan Jl Pondok Sejahtera Gg 1, Jl Klarang Anyar ruas 1, Jl Komplek Cistr Citra Wikatama Kel Loktabat Utara	205.880.945,00
39.	Perbaikan jalan lingkungan Jl Kartika 1, Gang Barokah RT 38/07 dan Gang Bayam RT 3/07, Kebun Sayur RT 3/07 Kel Loktabat Utara, Gang Damai Landasan Ulin Timur	193.020.945,00
40.	Perbaikan Jl Lingkungan RT 29 RW 6 Syamsuddin Noor	139.985.945,00
41.	Perbaikan Jl Lingkungan Komplek Pondok sejahtera GT Manggis	69.871.945,00
42.	Perbaikan jalan lingkungan Kampung Hanyar RT 41 RW 07 Kel Cempaka	198.976.945,00
43.	Rehab Jembatan Komet Gang 3 Kel Mentaos	206.523.058,00
44.	Rehab Oprit Jembatan Batu Ampar Kel Cempaka	206.145.030,00
45.	Rehabilitasi Revitalisasi bangunan air Sei Lukudat DI Guntung Payung	197.086.365,00
46.	Peningkatan saluran Handil Kyai DI Bangkal (lanjutan)	1.313.174.103,00
47.	Peningkatan Saluran Sei Tempurau DI Bangkal	193.232.260,00
48.	Rehabilitasi/pemasangan siring dinding penahan Sei Guntung Payung	112.381.000,00
49.	Rehabilitasi Siring Sei Kemuning (Jembatan Kemuning - Jembatan GT Lua)	938.675.141,00
50.	Rehabilitasi siring Sei Ujung Murung	206.176.859,00
51.	Peningkatan Sal. Lukudat DI. Guntung Payung (lanjutan)	2.989.266.645,00
52.	Normalisasi saluran Sei Tegal Arum DI Syamsuddin Noor	165.523.813,00
53.	Normalisasi Drainase Jl. Zam zam Jailani	1.145.548.022,00
54.	Normalisasi Drainase Jl. Palam	111.905.560,00
55.	Normalisasi Drainase Jl. Sidomulyo Kel. Landasan Ulin Utara	148.703.269,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	URAIAN	NILAI (Rp)
56.	Normalisasi Drainase Jl. Kampung Baru (SDN LUT) Kel. Landasan Ulin Timur	163.343.205,00
57.	Pembangunan drainase Jl Bukit Raya Kel Lok Selatan	739.800.332,00
58.	Pembangunan Drainase Jl. Batas Kota Dalam Kel. Sungai Ulin	1.327.643.186,00
59.	Normalisasi Drainase Jl. Mulia dan Jl. Al Jafri	203.245.655,00
60.	Normalisasi Drainase Jl Jati	381.849.340,00
61.	Normalisasi Drainase Jl. Rambai Tengah	86.801.621,00
62.	Normalisasi Drainase Jl. Komplek Sawit Kel. Sungai Besar	203.306.699,00
63.	Normalisasi Drainase Jl. Wijaya Kusuma	56.060.702,00
64.	Normalisasi Drainase Jl. Sapta Marga Kel. Guntung Payung	191.048.565,00
65.	Drainase Jl. Peramuan	554.494.673,00
66.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Dharma Koesuma	267.430.831,00
67.	Pembangunan jalan Tercapai (lanjutan) LUB	951.103.028,00
68.	Perbaikan Jl Lingkungan RT 7 RW 2	207.785.945,00
69.	Pembuatan jembatan Jl UT Handil Kyai DI Bangkal	194.255.581,00
70.	Rehabilitasi Pemeliharaan Sei Besar dan Sei Kemuning	2.157.482.000,00
71.	Normalisasi Drainase Jl. Golf (Lanjutan) Kel. Syamsuddin Noor	126.217.712,00
72.	Normalisasi Drainase Jl. Air Bus	62.189.428,00
73.	Normalisasi Drainase Jl. Intan Sari	28.256.006,00
74.	Normalisasi drainase Jl Pangeran Suriansyah (Lanjutan)	1.428.990.569,00
75.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Binamarga	142.233.379,00
76.	Perbaikan jalan lingkungan dan sal komplek Fitria Mandiri	178.057.945,00
77.	Pembuatan Jembatan Jl Usaha Tani DI Sei Lurus (Bel 623 Sungai Ulin)	192.093.589,00
78.	Normalisasi Pembuatan Sal Sekunder Tambak Jariyah- Daya Sakti	171.394.485,00
79.	Rehabilitasi embung Sungai Besar dan pemasangan tabat limpas	50.478.239,00
80.	Rehabilitasi Bangunan Pelimpas Embung Gunung Kapur	108.784.140,00
81.	Pelebaran jembatan Embung Sidodadi	148.029.036,00
82.	Normalisasi drainase Jl Basuki Rahmad Kel Komet	3.991.676.819,00
83.	Normalisasi Drainase Jl. Sejahtera (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Selatan	159.007.773,00
84.	Normalisasi drainase Jl. Arjuna	8.612.254,00
85.	Normalisasi drainase Jl. Komp Amaco	40.405.947,00
86.	Normalisasi drainase Jl. Gotong Royong	50.309.753,00
87.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Ambulung	933.984.923,00
88.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Rancah	583.426.079,00
89.	Rehabilitasi /pemasangan siring dinding penahan Sei Gotong Royong dan Sei Durian	107.676.000,00
90.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Kampung Gumpal	1.502.573.452,00
91.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Rimba Gg Tonhar (lanjutan)	167.122.000,00
92.	Pemasangan siring dinding penahan Sei. Guntung Paikat (lanjutan)	294.793.000,00
93.	Pemasangan Siring Dinding penahan Sei Guntung Kapur (lanjutan)	132.667.000,00
94.	Pemasangan siring Sei Jl Handil Makmur	202.734.861,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	URAIAN	NILAI (Rp)
95.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Kuranji (Komplek Mekatama Raya) (lanjutan)	132.487.000,00
96.	Normalisasi dan pemasangan siring dinding penahan Sei Mentaos	132.515.000,00
97.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Guntung Alaban (lanjutan)	157.642.000,00
98.	Pemasangan siring dinding penahan Saluran Tirta Galuh (Denzipur) (lanjutan)	157.621.000,00
99.	Pemasangan siring dinding penahan saluran sekunder (Jl Pondok IV) (lanjutan)	122.505.000,00
100.	Pembuatan Groundsiil Sei Kemuning (Kel Guntung Paikat)	127.568.000,00
101.	Normalisasi Saluran Kuranji (Inlet) dan dan saluran Sei Basung (outlet) embung Cempaka	139.749.515,00
102.	Pemasangan siring Dinding Penahan Sei Ulin (Komplek Sungai Ulin Permai) Lanjutan	182.819.000,00
103.	Normalisasi dan pemasangan siring dinding penahan Saluran Gang Amanah	196.945.000,00
104.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sumba	1.533.112.136,00
105.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Kaca Piring	248.362.083,00
106.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl. Air Bus / Angkasa	350.008.405,00
107.	Rehabilitasi Jl Ponpes Mistahul Munir	1.559.649.441,00
108.	Rehabilitasi Jl Harapan Jaya	303.332.488,00
109.	Rehabilitasi Jl Sapta Marga VI/Blok F	376.079.122,00
110.	Rehabilitasi Jl KH Emas	517.126.496,00
111.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal tembus Kuburan Muslimin Bangkal	370.145.460,00
112.	Pengaspalan Jl Benawa tembus Ponpes Yasin	206.906.058,00
113.	Pengaspalan Jl Pondok Labu	82.055.470,00
114.	Perkerasan Jl Kelapa Sawit 8 Ujung	151.546.882,00
115.	Perkerasan Jl Sei Sumba II tembus Jl Sidorejo	206.855.084,00
116.	Pengaspalan Jl Pondok Labu	82.055.470,00
117.	Perkerasan Jl Kelapa Sawit 8 Ujung	151.546.882,00
118.	Perkerasan Jl Sei Sumba II tembus Jl Sidorejo	206.855.084,00
119.	Perkerasan Jl Lamandau Kel Mentaos	165.688.226,00
120.	Perkerasan Jl MIN Bangkal Ujung Kel Bangkal	178.765.297,00
121.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Bersama/ Korea	732.536.584,00
122.	Pembangunan jalan Pendarapan (Akses kampus IAIN Baru) LU timur	620.023.035,00
123.	Peningkatan Jalan Komp. Al – Baiti	203.648.740,00
124.	Peningkatan Jalan Komp. Bunda	176.124.437,00
125.	Peningkatan Jalan Jl. Permadi	208.519.142,00
126.	Peningkatan Jalan Jl. Keluarga	63.147.281,00
127.	Peningkatan Jalan Komp. Griya Alam Lestari	304.253.954,00
128.	Peningkatan JalanKomp. Pondok Permai Asri	141.695.733,00
129.	Peningkatan Jalan Komp. Graha falah Mandiri	115.197.760,00
130.	Peningkatan Jalan Komp. Pondok Bunga 1	57.126.146,00
131.	Peningkatan JalanKomp. Pondok Bunga 2	63.694.657,00
132.	Peningkatan Jalan Pondok bunga Bougenvile	83.300.669,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
133.	Peningkatan Jalan Pondok bunga adenium	43.541.270,00
134.	Peningkatan Jl Karang Pandan	158.925.635,00
135.	Peningkatan Jl. Karang Mauni	98.154.463,00
136.	Peningkatan Jl. Asoka	128.633.352,00
137.	Peningkatan Komp. Kevin Resort	440.581.682,00
138.	Peningkatan Jl. Pondok Indah 2	110.283.816,00
139.	PeningkatanJl. Karang Karya	381.421.525,00
140.	PeningkatanJl. Karang Nusa	33.309.071,00
141.	PeningkatanJl. Madani	98.838.683,00
142.	Peningkatan JalanKomp. Kumala Borneo	80.769.055,00
143.	Peningkatan Jalan Komp. Graha Idaman Permai	76.197.222,00
144.	Peningkatan JalanKomp. Pandan Sari	181.131.683,00
145.	Peningkatan JalanKomp. Graha Fallah Jaya	404.933.810,00
146.	Peningkatan Jl Pondok Rawa Indah	388.675.503,00
147.	Peningkatan Jalan Komp. Sukarelawan Permai 1	324.003.039,00
148.	PeningkatanJalan Komp. Sukarelawan Permai 2	222.609.429,00
149.	Peningkatan Jl. Intan	768.394.311,00
150.	PeningkatanJl Komp. Permata Indah 1	96.454.742,00
151.	Peningkatan Jl. Indragiri	123.087.917,00
152.	Peningkatan Komp. Citra Megah Raya	271.971.405,00
153.	Peningkatan Jl. Bina Satria	82.292.206,00
154.	Peningkatan Jl. Lingkungan Bina Permata	610.451.998,00
155.	Peningkatan Jl. Pondok Pisang	134.283.795,00
156.	Peningkatan Jl Komp. Puri Permata Indah	162.715.653,00
157.	Peningkatan Jl. Intan	21.223.780,00
158.	Peningkatan KOMP. TIA PERMATA RESORT	533.950.032,00
159.	Peningkatan Jl. KOMP. PINUS INDAH	242.985.510,00
160.	Peningkatan Jl. KOMP. PESONA PINUS INDAH	121.283.857,00
161.	Peningkatan Jl. GOTONG ROYONG III	141.559.273,00
162.	Peningkatan Jl. KOMP. DAMAI	36.127.106,00
163.	Peningkatan Jl. KOMP. PERMATA HIJAU PERMAI	493.804.974,00
164.	Peningkatan Jl. LINGKUNGAN RT 12	112.729.671,00
165.	Peningkatan Jl. KOMP.PESONA PERMATA INDAH 2	516.243.693,00
166.	Peningkatan GANG KASTELA	1.030.725.991,00
167.	Peningkatan Jl.GG.NANGKA	348.680.838,00
168.	Peningkatan Jl.KOMP.NADYA PERMAI	149.642.512,00
169.	Peningkatan Jl.KOMP. PONDOK LIMAUI	77.807.979,00
170.	Peningkatan Jl. KOMP. MUSTIKA GRIA BUKIT ASRI	306.330.629,00
171.	Peningkatan Jl. LINGKUNGAN PERAMBAIAN	203.097.207,00
172.	Peningkatan Jl. KOMP.GRIYA SINAR BARU	39.155.839,00
173.	Peningkatan KOMP. BANYU BIRU	45.100.109,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
174.	Peningkatan Jl. KOMP. GREEN ORCHID	23.122.668,00
175.	Peningkatan Jl. KOMP. GRIYA NALAR ASRI	106.669.668,00
176.	Peningkatan Jl.Komp. Dahlina Permai	214.166.898,00
177.	Peningkatan Jl.Komp. Widya Citra Elok III	337.247.156,00
178.	Peningkatan Jl. Gurame	126.705.596,00
179.	Peningkatan Jl.Gg. Muslimin	176.038.529,00
180.	Peningkatan Jl. SMK Penerbangan	572.146.468,00
181.	Peningkatan Jl. Komp. Pesona & Junjung Buih	257.552.009,00
182.	Peningkatan Jl. Lestari	551.920.469,00
183.	Peningkatan Jl.Komp. Surya Mas	185.798.621,00
184.	Peningkatan Jl. Lingkungan Bina Permata	346.984.590,00
185.	Peningkatan Jl.Komplek Nirwana Permata Indah	111.700.091,00
186.	Peningkatan Jl. Lestari Rt.29	85.818.570,00
187.	Peningkatan Jl. Husad Permai & Bina Warga	168.464.969,00
188.	Peningkatan Jl. Komp. Ratu Elok	184.620.386,00
189.	Peningkatan Jl.Komp. Kelapa Gading 1	302.347.604,00
190.	Peningkatan Jl.Komp. Beringin	199.812.822,00
191.	Peningkatan Jl.Komp. Griya Wahyu Perdana	352.974.010,00
192.	Peningkatan Jl.Komp. Citra Berlian	776.611.428,00
193.	Peningkatan Jl. Srikandi	368.667.461,00
194.	Peningkatan Jl.Komp. Perumahan Permata Asri	23.411.541,00
195.	Peningkatan Jl. Jenaka	367.038.086,00
196.	Peningkatan Jl.Komp. Pandawa Abaditama	92.445.574,00
197.	Peningkatan Jl.Komp. Buana Permai	258.127.252,00
198.	Peningkatan Jl.Gg. Shinta	122.460.370,00
199.	Peningkatan Jl.Komp. Paikat Permai	350.572.826,00
200.	Peningkatan Jl.Komp. Sinar Rizky	131.722.079,00
201.	Peningkatan Jl.Komp. Halim	715.295.486,00
202.	Peningkatan Jl.Komp. Idaman Estate	805.768.664,00
203.	PeningkatanJl Lingkungan KOMP. CEMPAKA SARI	3.011.867.167,00
204.	Peningkatan Jl Lingkungan PERUM CITRA HASANAH PERM	236.054.636,00
205.	Peningkatan Jl Lingkungan KOMP.CEMPAKA INDAH	171.892.003,00
206.	Peningkatan Jl Lingkungan KOMP. BUMI HUNIAN ASRI	118.633.972,00
207.	Peningkatan Jl. Komplek Citra Pesona Mandiri Asri	1.770.976.466,00
208.	Peningkatan Jl. Al Mukarramah	253.981.060,00
209.	Peningkatan Jl. Cendrawasih	97.129.707,00
210.	Peningkatan Jl. Logam	83.265.754,00
211.	Peningkatan Jl.Komp. Kirana	204.595.854,00
212.	Peningkatan Jl.Komp. Bukit Harapan Permai	211.158.672,00
213.	Peningkatan Jl.Komp. Bumi Landasan Ulin	600.169.714,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
214.	Peningkatan Jl.Sidomulyo Raya	1.293.777.551,00
215.	Peningkatan Jl.Mangga	119.056.505,00
216.	Peningkatan Jl.Pisang	83.522.717,00
217.	Peningkatan Jl.Pisang I	119.056.505,00
218.	Peningkatan Jl. Pisang II	63.741.021,00
219.	Peningkatan Jl.Seroja	225.169.432,00
220.	Peningkatan Jl LingkunganRT. 11	63.374.693,00
221.	Peningkatan Jl LingkunganRT. 16	95.245.204,00
222.	Peningkatan Jl. Kasturi Indah 2	86.453.339,00
223.	Peningkatan Jl. Kasturi Indah 3	138.471.874,00
224.	Peningkatan Jl.Komp. Kota Santri	557.428.665,00
225.	Peningkatan Jl.Komp. Wella Mandiri	1.567.882.606,00
226.	Peningkatan Jl.Komp. Nyiur Hijau	978.339.204,00
227.	Peningkatan Jl. Hijrah	133.343.286,00
228.	Peningkatan Alkah	61.176.727,00
229.	Peningkatan Jl. Makmur	340.168.998,00
230.	Peningkatan Jl. Komp. Putri Tama 3	143.730.260,00
231.	Peningkatan Jl.Komp. Angkasa Kurnia Resort 1	200.070.750,00
232.	Peningkatan Jl.Komp. Angkasa Kurnia Resort 2	254.728.113,00
233.	Peningkatan Jl.Komp. Citra Mandiri Permai	411.259.014,00
234.	Peningkatan Jl. Gg. Hidayah	94.786.674,00
235.	Peningkatan Jl.Komp. Citra Pesona Langit	276.564.482,00
236.	Peningkatan Jl.Gg. Sulaiman	56.947.935,00
237.	Peningkatan Jl.Gg. Wijaya	56.947.935,00
238.	Peningkatan Jl.Gg. Sepakat	96.963.350,00
239.	Peningkatan Jl. Kavlingan 1	104.531.098,00
240.	Peningkatan Jl. Komp. Harmoni	26.575.703,00
241.	Peningkatan Jl. Kavlingan 2	57.707.240,00
242.	Peningkatan Jl.Gg. Mufakat	152.495.180,00
243.	Peningkatan Jl.Gg. Purnama	190.965.408,00
244.	Peningkatan Jl.Gg. Kurihing	322.451.863,00
245.	Peningkatan JISamping Kantor Kelurahan	89.598.084,00
246.	Peningkatan JIPosyandu	46.317.653,00
247.	Peningkatan JIKomp. Sukses Mandiri	270.432.455,00
248.	Peningkatan JIKomp. Citra Mandiri Permai 3	172.362.416,00
249.	Peningkatan Jl. Damai	829.580.020,00
250.	Peningkatan JIKomp. Asmi 1	193.781.167,00
251.	Peningkatan JIGg. Pepaya	171.900.401,00
252.	Peningkatan JIGg. TK Mufakat	101.117.883,00
253.	Peningkatan JIGg. Samping SPBU	204.779.612,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
254.	Peningkatan Jl. Berkat Karya	429.274.031,00
255.	Peningkatan Jl. Dua Sekawan	475.444.838,00
256.	Peningkatan JIGg. Dandaman	84.582.883,00
257.	Peningkatan JIGg. Almuhammad	169.165.766,00
258.	Peningkatan Jl. Mayjend D.I Panjaitan	143.091.344,00
259.	Peningkatan Jl. Komplek Green Tasbih	517.155.059,00
260.	Peningkatan JIGg. RO ULIN - JL. MERPATI RUAS 1	370.727.925,00
261.	Peningkatan JIGg. BATA 1 - Gg. BATA 2	237.487.736,00
262.	Peningkatan JIKOMP. PURI IDAMAN -	325.557.557,00
263.	Peningkatan Jl. SUKARELAN PERMAI 2	273.052.304,00
264.	Peningkatan Jl. NGADIMAH TEMBUS JL. ABIB ALWI (R.3)	54.207.891,00
265.	Peningkatan JIGang Keluarga I dan 2	232.646.626,00
266.	Peningkatan JIKOMP.FITRIA MANDIRI REGENCY	57.166.049,00
267.	Peningkatan Jl. GALUH CEMPAKA	634.412.633,00
268.	Peningkatan JIKOMP. GALUH CEMPAKA	531.830.459,00
269.	Peningkatan JIKOMP. GALUH CEMPAKA III	79.731.526,00
270.	Peningkatan JIKOMP CEMPAKA RESIDENCE	151.726.662,00
271.	Peningkatan JIKOMP MEGA INFERIUM	493.648.066,00
272.	Peningkatan Jl.SUNGAI RANCAH	122.713.389,00
273.	Peningkatan JIMENUJU PANTI ASUHAN	339.896.169,00
274.	Peningkatan JISUNGAI RANCAH LINK 1	61.822.417,00
275.	Peningkatan JIKOMP. BUMI HUNIAN ASRI	223.148.362,00
276.	Peningkatan JIBASUNG	47.495.130,00
277.	Peningkatan JIWENGGGA 5	513.336.857,00
278.	Peningkatan JIKOMP. WENGGGA KUDA	415.043.830,00
279.	Peningkatan JILING. RT 40 KEL GUNTUNG MANGGIS	1.095.318.325,00
280.	Peningkatan Jl. KEBUN DURIAN	365.121.865,00
281.	Peningkatan JIKOMP. WIDYA CITRA GRAHA 2	324.397.314,00
282.	Peningkatan JIKOMP. CITRA PALM RT 45	339.993.411,00
283.	Peningkatan JIKOMP. MUSTIKA	132.333.683,00
284.	Peningkatan JIKOMP. SURYA INDAH 1	701.220.529,00
285.	Peningkatan JIBELAKANG VIHARA	36.577.492,00
286.	Peningkatan JIKOMP.GRAHA MANDIRI PERMAI	90.599.889,00
287.	Peningkatan JIKOMP. BENAWA RAYA	1.071.301.680,00
288.	Perbaikan jalan lingkungan RT 12 RW 02 Kel Guntung Manggis	208.133.945,00
289.	Perbaikan jalan lingkungan Komplek Griya Mulia Kelurahan Guntung Manggis	207.485.945,00
290.	Perbaikan jalan lingkungan RT01 RW 01 Kel Landasan Ulin Selatan	143.053.945,00
291.	Perbaikan Jalan perumahan Disabilitas Tuna Netra Kota Banjarbaru	105.961.945,00
292.	Perbaikan jalan Komplek Griya Asri Abadi 2 RT 29 RW 07 Kel Sungai Ulin	159.769.945,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
293.	Perbaiki Jl lingkungan RT 3 RW 1 Landasan Ulin Barat	159.385.945,00
294.	Perbaiki Jalan lingkungan Jl Abimanyu G 1, G 2 , G 3, RT 12 Rw 3 Komplek Pondok Idaman rt 3 rw 5 Kemuning GT Paikat	69.885.945,00
295.	Perbaiki Jl Lingkungan RT 3 RW 9 dan Jl Lingkungan RT 04/08 LU Timur	175.292.945,00
296.	Perbaiki Jl Lingkungan Komplek Bumi Hunian Asri RT 37 Cempaka	208.029.945,00
297.	Perbaiki Jl Lingkungan RT 2 RW 2 Landasan Ulin Timur	207.349.945,00
298.	Perbaiki Jl Lingkungan RT 3 RW 2 dan Jl Dewi Kunti	111.685.945,00
299.	Perbaiki Jl Lingkungan Perum Bukit Zam zam RT 05 Rw 1 GT Manggis	57.985.945,00
300.	Perkerasan Halaman belakang Gor Rudy Resnawan Kota Banjarbaru	207.701.945,00
301.	Peningkatan Jalan UT Tanggul DI Palam	187.802.044,00
302.	Pembuatan jalan Usaha tani Danau Purun(Kertak Baru-Alur) Kel Cempaka	141.598.698,00
303.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DI Bangkal dan Rehabilitasi	31.970.143,00
304.	Peningkatan jalan UT tanggul palam-Handil Kyai	201.328.152,00
305.	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Jln Menuju Ponpes Yasin Guntung Manggis	1.315.842.723,00
306.	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Guntung Paikat Kel Guntung Paikat	1.847.862.677,00
307.	Rehab Total Jembatan Barokah/Penghubung RT 29 ke RT 43	205.906.011,00
308.	Rehab Jembatan Guntung Ramania Kel Sungai Ulin	205.673.002,00
309.	Pembangun Box Culvert 1 Jl. Babusalam Kel Bangkal Keg Pembangunan Jembatan	448.768.661,00
310.	Pembangun Box Culvert 2 Jl. Babusalam Kel Bangkal Keg Pembangunan Jembatan	128.236.759,00
311.	Pembangunan Box Culvert 3 Jl. Babusalam Kel Bangkal Keg Pembangunan Jembatan	448.828.659,00
312.	Pembangunan Box Culvert 4 Jl. Babusalam Kel Bangkal Keg Pembangunan Jembatan	256.473.519,00
313.	Rehabilitasi/pemasangan Titian Sungai Dadap	117.660.000,00
314.	Pemasangan Titian Guntung Paikat Sei Kemuning	127.720.000,00
315.	Peningkatan Saluran Sei Jembatan II DI Landasan Ulin Barat (lanjutan)	3.089.260.669,00
316.	Pembuatan slab culvert 3 x 8 m Guntung Komplek Nyiur Hijau RT 29 RW 06 Kel Syamsuddin Noor	106.450.000,00
317.	Pembangunan Embung Cempaka	2.633.452.592,00
318.	Drainase komplek RO Ulin Lok Selatan	1.057.614.338,00
319.	Pembangunan Saluran Drainase Komplek Banua Permai Kel Sungai Besar	981.993.294,00
320.	Pembangunan Saluran Drainase komplek Rizky manunggal, Komplek Rizky Pesona, Kel Sungai Ulin	892.214.023,00
321.	Pembangunan Saluran Drainase Komplek Rizky Permata Kel Sungai Ulin	615.869.410,00
322.	Pembangunan Saluran Drainase Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 Kel Cempaka	720.832.740,00
323.	Pembangunan Saluran Drainase Komplek Mustika, Komplek Idaman Komplek Kirana Kel LU Timur	720.125.873,00
324.	Pembangunan Saluran Drainase Gang Sawo Kel Syamsuddin Noor	365.500.290,00
325.	Pembangunan Saluran Drainase komplek Wella Mandiri Kel Syamsuddin Noor	746.485.214,00
326.	Pembangunan Saluran Drainase komplek Wengga 4 Kel LU Utara	319.892.511,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
327.	Drainase lingkungan Jl Sidomulyo 1 RT 01 dan RT 02 RW 1 Guntung Payung	206.723.318,00
328.	Drainase Lingkungan Komplek Graha Puncak	193.155.826,00
329.	Drainase lingkungan Jl Gg Damai RT 11 RW 3 Landasan Ulin Barat	204.941.333,00
330.	Drainase lingkungan Gg Rahayu Loktabat Selatan	182.914.146,00
331.	Drainase lingkungan Jl Intan, Intan 8 Lok Utara	205.940.868,00
332.	Drainase lingkungan Jl Komplek Citra Berlian Kel Guntung Paikat	207.375.663,00
333.	Drainase lingkungan Komp Berlina Jl Nuri RT 3 RW 3 Jl ASABRI III dan IV RT 3 RW 5 Lands Ulin Timur	130.979.973,00
334.	Rehabilitasi Pemeliharaan drainase Lingkungan Jl ASABRI III dan IV RT 3 RW 5 Lands Ulin Timur	74.973.883,00
335.	Drainase Lingkungan Komplek Manunggal Jaya III RT.04 RW.04 Kel. Landasan Ulin Timur	198.000.488,00
336.	Jl ASABRI III dan IV RT 3 RW 5 Lands Ulin Timur	74.973.883,00
337.	Drainase lingkungan komplek Manunggal Jaya III RT 4 RW 4 Landasan Ulin Timur	198.000.488,00
338.	drainase lingkungan komplek Husindo Raya RT 3 RW 1 Kel Cempaka	205.776.794,00
339.	Drainase lingkungan Jl Kasturi RT 5 RW 3 Landasan Ulin Tengah	205.911.847,00
340.	Drainase lingkungan Komplek Barata Jl Dewi Kunti Kel Sungai Ulin	200.135.684,00
341.	Drainase lingkungan Komp Mustika Permai II RT 35Guntung Manggis	157.447.098,00
342.	Drainase lingkungan Gg A Yani RT 4 RW 11 Landasan Ulin Barat	205.718.773,00
343.	drainase lingkungan Kasturi Gg 5 RT 31 RW 7 drainase Jl Komplek Kasturi 2 Bataan Syamsuddin Noor	205.620.693,00
344.	Drainase lingkungan samping SMPN 4 Landasan Ulin Timur	165.091.305,00
345.	Drainase lingkungan RT 44 RW 11 dan RT 34 RW 7 Sungai Besar	205.536.651,00
346.	Drainase lingkungan komplek Mekatama raya Jl Jeruk Guntung Manggis	205.862.825,00
347.	Drainase lingkungan RT 26 RW 6 Syamsuddin Noor	206.261.050,00
348.	Drainase lingkungan Komp Karang RT 3 RW 6 Landasan Ulin Timur	205.586.704,00
349.	Drainase lingkungan Komplek Wirayudha RT 24 RW 06 Sungai Ulin	205.387.557,00
350.	Drainase lingkungan Sei Sumba Gg Lingkar RT 10 RW 01 Guntung Manggis	205.815.800,00
351.	Drainase lingkungan Komplek Taman Bina Murni 2 RT 05 RW 2 Loktabat Utara	205.729.053,00
352.	Drainase lingkungan Komplek Griya Permai II RT 49 Guntung Manggis	205.865.856,00
353.	Drainase Lingkungan Komplek Buana Permai GT Paikat	38.051.901,00
354.	Drainase Lingkungan Komplek Wengga 2 Landsan Ulin Utara	34.274.690,00
355.	Drainase Lingkungan Komplek Kehutanan Ratu Elok Sungai Besar	88.134.919,00
356.	Drainase Lingkungan Jl London dan Jl Den Haag Kelapa Gading Sungai Besar	17.517.902,00
357.	Normalisasi Drainase Jl Mustaqim	930.690.207,00
358.	Normalisasi Drainase Jl Candra Buana	715.915.544,00
359.	Normalisasi Drainase Jl Zam Zam Buana	1.932.971.969,00
360.	Pembangunan drainase Jl Jeruk Kel sungai Ulin	2.216.280.063,00
361.	Pembangunan drainase jalan Perambaian Kel Sungai ulin	1.591.756.631,00
362.	Normalisasi Drainase Jl. Trikora menuju Jl. Al Jafri Kel. Kemuning	166.811.377,00
363.	Normalisasi Drainase Jl. Sawi Kel. Loktabat Utara	197.078.559,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
364.	Normalisasi Drainase Jl. Kasturi Kel. Syamsuddin Noor	126.934.925,00
365.	Normalisasi Drainase Jl. Nuri KegPemeliharaan Rutin drainase	20.163.437,00
366.	Normalisasi Drainase Jl. Pandu Keg Pemeliharaan Rutin drainase	193.079.879,00
367.	Pembuatan Plat Beton Drainase Jl. Karya Utama Kel. Landasan Ulin Utara	112.115.985,00
368.	Normalisasi Drainase Jl. Komp. Chandra Utama Kel. Guntung Manggis Kel. Gt.Manggis	190.744.243,00
369.	Normalisasi Drainase Jl. Kasturi 2 Kel. Syamsuddin Noor	188.363.460,00
370.	Normalisasi Drainase Jl. Guntung Paring Kel. Syamsudin Noor	195.585.874,00
371.	Normalisasi Drainase Jl. Kelapa KegPemeliharaan Rutin drainase	47.103.544,00
372.	Normalisasi Drainase Jl. UPT Trans KegPemeliharaan Rutin drainase	18.518.557,00
373.	Normalisasi Drainase Jl. Kelurahan Kel. Palam KegPemeliharaan Rutin drainase	202.322.328,00
374.	Normalisasi Drainase Jl. Kartini	2.291.096.044,00
375.	Normalisasi Drainase Jl. Intan Raya Kel. Loktabat Utara KegPemeliharaan Rutin	170.071.483,00
376.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Guntung Kupang (lanjutan)	132.533.000,00
377.	Normalisasi dan Pemasangan siring Dinding Penahan Sei Kertak Baru	132.345.000,00
378.	Normalisasi dan pemasangan dinding penahan Sei Guntung Manggis	197.074.000,00
379.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sidomulyo	202.865.549,00
380.	Pengembangan sistem distribusi air minum Jl Transad 2, 3 Guntung Manggis	265.165.805,00
381.	Pengembangan sistem distribusi air minum Jl Bina Satria Lok Utara	118.449.000,00
382.	Pengembangan sistem distribusi air minum Jl Intan 12 Loktabat Utara	101.770.801,00
383.	Pengembangan sistem distribusi air minum Jl Sinar Baru Sungai Ulin	48.076.789,00
384.	Pengembangan sistem distribusi air minum Jl Sampurna Lok Utara	187.516.006,00
385.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Jl lingkungan menuju TPS3R Gotong Royong Loktabat Selatan	189.698.694,00
386.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Gg Radar Indah	116.783.005,00
387.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Gg Argopuro Jl RO Ulin Kel Loktabat selatan	84.844.033,00
388.	Jaringan pipa interkoneksi dia 150 mm Jl perambaan koneksi Jl Jeruk Kel Sungai Ulin	760.252.296,00
389.	Pengembangan sistem distribusi air minum Komplek Royal Rise Residence Kel Landasan Ulin Utara	87.677.695,00
390.	Pengembangan sistem distribusi air minum kompleks Griya Harmoni 1 Jl Kurnia LU Timur.	82.882.814,00
391.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komplek Vila Mahatama Kel Syamsuddin Noor	203.996.851,00
392.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl Pembataan tembus Jl Gatot Kasturi Kel Syamsuddin Noor	153.722.539,00
393.	Pengembangan sistem distribusi air minum Komplek Putri Regensi	88.046.252,00
394.	Pengembangan sistem distribusi air minum Komplek Caraka Graha Pelangi	16.339.172,00
395.	Pengembangan sistem distribusi air Komplek DPR	50.671.248,00
396.	Pengembangan sistem distribusi air Komplek Grand Harmoni 2	29.106.199,00
397.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komplek Angkasa Raya Permai	80.096.308,00
398.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komplek Citra Mandiri Permai 3 dan Komplek Giya Sinar Kencana	78.656.669,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
399.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl Setia Kawan Kel LU Utara	45.086.895,00
400.	Pengembangan sistem distribusi air	103.517.438,00
401.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl. Kurihing (3")	122.542.004,00
402.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Griya Pelita Asri (2)	51.139.576,00
403.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Griya Permata Indah	92.726.664,00
404.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komp. Perum Rinartha (2")	27.563.908,00
405.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl. Makmur (3")	91.424.055,00
406.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl. Pelita 5 Golf (4")	64.728.569,00
407.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Lambung Mangkurat Residence Kel Palam	629.092.463,00
408.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Cahaya Idaman Cempaka	66.051.560,00
409.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Graha Citra Megah	117.815.386,00
410.	Optimalisasi MBR Pipa dia 50-100 mm Pengembangan Kawasan Sungai Ulin Kel. Landasan Ulin Selatan	605.168.793,00
411.	Optimalisasi MBR Pipa dia 50-100 mm Pengembangan Kawasan Pengayuan Kel. Landasan Ulin Selatan	561.051.525,00
412.	Optimalisasi MBR Pipa dia 50-100 mm Pengembangan Kawasan Trikora Kel. Guntung Manggis	712.676.077,00
413.	Optimalisasi MBR Pipa dia 50-100 mm Pengembangan Kawasan Cempaka Kel. Cempaka	692.143.411,00
414.	Optimalisasi MBR Pipa dia 50-100 mm Pengembangan Kawasan Palam Kel. Palam	633.764.694,00
415.	Jaringan pipa dia 63 mm Komplek Pelita Golf Asri, Jl. Makmur Kel. Landasan Ulin Utara	206.438.521,00
416.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63 mm Komplek Mahkota Trikora 3 Tahap I Guntung Harapan Kel. Guntung Manggis	206.053.435,00
417.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63 mm Komplek Mahkota Trikora 3 Tahap II Guntung Harapan Kel. Guntung Manggis	157.085.466,00
418.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63 mm Komplek Mahkota Trikora 3 Tahap III Guntung Harapan Kel. Guntung Manggis	121.736.860,00
419.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63-110 mm Komplek Cahaya Pelangi Tahap I Jalan Sriwijaya Ujung Kel. Landasan Ulin Utara	206.462.622,00
420.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63-110 mm Komplek Ramania Jl. Tambak Langsung Kel. Syamsudin Noor	205.927.031,00
421.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63-90 mm Jl. Sukamara dan Jl. Timbang Rasa Komplek Perumahan Anugerah Kel. Landasan Ulin Utara	169.338.820,00
422.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 110 mm Jl. Tambak Langsung Kel. Syamsudin Noor	173.547.177,00
423.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63-90 mm Komplek DPR Asri 5 Jl Golf LU Utara	92.464.606,00
424.	Pemasangan Jaringan Pipa dia 63-90 mm Komplek Putritama Jl Peramu LU Timur	89.665.962,00
425.	Pengadaan Tanah fasilitas Umum untuk Resapan Air / Embung Liang Anggang	1.437.148.000,00
426.	Pembangunan Jalan Baru Penghubung Jl. Panglima Batur – Jl. Karang Anyar	6.518.391.751,00
427.	Inventarisasi jaringan jalan. Drainase dan jembatan kota banjarbaru	436.300.000,00
428.	Data Base Sungai Kota Banjarbaru Keg Rehabilitasi / Pemeliharaan	257.265.000,00
429.	Inventarisasi Jembatan	49.323.000,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
429.	Perencanaan teknis (pkt 1 Kec Landasan Ulin, Liang Anggang) Tahun 2018	50.288.000,00
430.	Perencanaan teknis (pkt 1 Kec Banjarbaru Utara, Bjb Selatan, Cempaka) Tahun 2018	49.576.000,00
431.	Perencanaan Tehnis rehabilitasi/pemeliharaan jembatan TA 2018	49.834.000,00
432.	Pembangunan Jembatan Jl. Guntung Manggis dan Jembatan Jl. Peramuang Ujung Kel. Guntung Manggis	6.458.777.902,00
433.	Perencanaan teknis pembangunan jembatan Th 2018	80.823.000,00
434.	Perencanaan teknis I 2018 (Landasan Ulin)	48.696.000,00
435.	Perencanaan teknis II 2018 (Kec Liang Anggang)	48.110.000,00
436.	Perencanaan teknis III 2018 (Cempaka , BJB Utara)	47.230.000,00
437.	Perencanaan teknis air minum paket I TA 2018	47.836.108,00
438.	Perencanaan teknis air minum paket II TA 2018	46.818.898,00
439.	Perencanaan teknis drainase paket I TA 2018	47.595.355,00
440.	Perencanaan teknis drainase paket II TA 2018	47.418.552,00
441.	Perencanaan Teknis Normalisasi Drainase Jalan Kota 2018	221.485.000,00
442.	Perencanaan teknis pembangunan drainase Jl Kota 2018	188.674.000,00
443.	Normalisasi drainase Jl RO Ulin Lok Selatan	2.849.235.986,00
444.	Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jalan 2018	192.940.000,00
445.	Perencanaan Teknis Tahun 2018	193.215.000,00
446.	Perencanaan Tehnis pembangunan Jalan 2018 (KDP)	211.079.000,00
447.	Perencanaan tehnis pembangunan jalan DAK 2018	183.205.000,00
448.	Perencanaan leger Jalan (tahap II)	234.712.000,00
449.	Normalisasi Drainase Jl. Trikora Kel. Sungai BesarJl. Trikora	142.265.113,00
450.	Normalisasi Drainase Jl. Trikora (depan RM. Aryanti), Jl. Peramuang Kel. Landasan Ulin Timur dan Jl. Air Bus Kel. Syamsuddin Noor	107.732.394,00
451.	Normalisasi Drainase Jl. A.Yani Km.32.4 - Km.33 Kel. Loktabat Selatan	150.343.808,00
452.	Pembersihan Gulma saluran Tambak Buluh LU TimurPembuatan Embung Cempaka	31.775.473,00
453.	Pembersihan sungai dan pengangkatan gulma terapung/padat	78.899.000,00
454.	Normalisasi Sungai GT Panggung	147.631.000,00
455.	Pembersihan sungai dan pengangkatan gulma terapung/padat	68.038.000,00
	JumlahPenambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	182.492.709.542,00

B. Penambahan terhadap Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Koreksi Tambah Catat Tahun 2016 sebesar Rp 3.640.484.000,00 yaitu Pembangunan jaringan dan pengambilan tegangan langsung dari Gardu Induk Cempaka untuk melayani Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru

C. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Dari Kontruksi Pada Pengerjaan (KIB F)Tahun 2017 sebesarRp11.853.472.124,00 terdiri dari :

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
-----	--------	------------

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl. Nusantara	3.901.830,00
2.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Karang Anyar II(pkt 2) (KDP 2016)	37.624.797,00
3.	Rehabilitasi Jalan Gotong Royong (Syamsuddin Noor) (pkt 1) (KDP 2016)	6.363.214,00
4.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Al Manar (pkt 2) (KDP 2016)	3.224.983,00
5.	Rehabilitasi / pemeliharaanJl Sukarelawan (pkt 2) (KDP 2016)	7.524.959,00
6.	Pelebaran Jalan Barjad Lok Utara (KDP 2016)	168.656.400,00
7.	Pembangunan jalan UPT Trans Kel Cempaka (KDP 2016)	75.895.380,00
8.	Rehabilitasi Jl Alternatif Trans (Cempaka (pkt 3) (KDP 2016)	10.820.040,00
9.	Rehabilitasi Jl Mujahidin (Cempaka) (pkt 3) (KDP 2016)	901.670,00
10.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Mawar (pkt 1) (KDP 2016)	28.666.512,00
11.	Pembangunan jalan peramuian Ujung (lanjutan) LU tengah) (KDP 2016)	134.756.050,00
12.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Raya (LU Timur)(pkt 1) (KDP 2016)	9.789.560,00
13.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Selatan (LU Timur)(pkt 1) (KDP 2016)	5.384.258,00
14.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Warga Tunggal (pkt 3) (KDP 2016)	5.574.044,00
15.	Rehabilitasi / pemeliharaanJl Gaharu (pkt 3) (KDP 2016)	3.901.831,00
16.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Pangeran Suriansyah Ujung (pkt 1) (KDP 2016)	28.666.512,00
17.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Teratai (pkt 1) (KDP 2016)	8.958.285,00
18.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Mawar (pkt 1) (KDP 2016)	3.583.314,00
19.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Sumber Sari (pkt 3) (KDP 2016)	25.640.602,00
20.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Unlam III menuju Sumber Sari (pkt 3) (KDP 2016)	1.114.809,00
21.	Pembangunan Jl Tambak Langsung (lanjutan) Syamsuddin Noor	109.626.660,00
22.	Rehabilitasi Jl Sapta Marga (pkt 2) (KDP 2016)	34.778.700,00
23.	Pembangunan jalan Guntung Manggis (lanjutan) (pkt 1) (KDP 2016)	72.560.950,00
24.	Rehabilitasi Jl Kuburan Muslimin Bangkal (pkt 3) (KDP 2016)	10.369.205,00
25.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal (pkt 3) (KDP 2016)	11.270.875,00
26.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Kemuning (pkt 3)(KDP 2016)	12.820.301,00
27.	Pembuatan jembatan Jl UT Handil Kyai DI Bangkal (KDP 2016)	4.346.100,00
28.	Peningkatan saluran Handil Kyai DI Bangkal (lanjutan) (KDP 2016)	10.207.260,00
29.	Peningkatan Jalan UT Tanggul DI Palam (KDP 2016)	4.346.100,00
30.	Rehabilitasi Siring Sei Kemuning (Jembatan Kemuning - Jembatan GT Lua) (KDP 2016)	8.578.780,00
31.	Rehabilitasi siring Sei Ujung Murung (KDP 2016)	19.228.300,00
32.	Peningkatan Saluran Lukudat DI Guntung Payung	4.349.236.710,00
33.	Pelebaran jembatan Embung Sidodadi (KDP 2016)	3.380.300,00
34.	Normalisasi drainase Jl Zam-Zam Jailani (KDP 2016)	54.898.800,00
35.	Pembangunan drainase Jl Bukit Raya Kel Lok Selatan (KDP 2016)	29.593.850,00
36.	Pembangunan drainase jalan Batas Kota Dalam Kel Sungai Ulin (KDP 2016)	52.358.350,00
37.	Pembangunan Drainase Jalan Peramuian	1.903.829.489,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
38.	Jl Kaca Piring(pkt 1)(KDP 2016)	5.374.971,00
39.	Pembangunan jalan Tercapai (lanjutan) LUB (KDP 2016)	42.164.100,00
40.	Rehabilitasi Revitalisasi bangunan air Sei Lukudat DI Guntung Payung (KDP 2016)	4.346.100,00
41.	Rehabilitasi Pemeliharaan Sei Besar dan Sei Kemuning (KDP 2016)	1.774.920,00
42.	Normalisasi drainase Jl Pangeran Suriansyah (Lanjutan) (KDP 2016)	20.587.050,00
43.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Bina Marga (pkt 3)(KDP 2016)	2.787.022,00
44.	Peningkatan Saluran Sei Tempurau DI Bangkal (KDP 2016)	4.346.100,00
45.	Normalisasi Pembuatan Sal Sekunder Tambak Jariyah- Daya Sakti (KDP 2016)	3.863.200,00
46.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DI Bangkal dan Rehabilitasi (KDP 2016)	965.800,00
47.	Rehabilitasi Bangunan Pelimpas Embung Gunung Kapur (KDP 2016)	2.414.500,00
48.	Normalisasi saluran Sei Tegal Arum DI Syamsuddin Noor (KDP 2016)	3.380.300,00
49.	Normalisasi drainase Jl Basuki Rahmad Kel Komet (KDP 2016)	102.935.250,00
50.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Ambulung (KDP 2016)	9.498.195,00
51.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Rancah (KDP 2016)	5.998.860,00
52.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Kampung Gumpal (KDP 2016)	14.997.150,00
53.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sidomulyo (KDP 2016)	1.999.620,00
54.	Normalisasi Saluran Kuranji (Inlet) dan saluran Sei Basung (outlet) embung Cempaka (KDP 2016)	2.897.400,00
55.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sumba	15.497.055,00
56.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Karang Anyar II (pkt 2)	5.374.971,00
57.	RehabilitasiJl Airbus/ Angkasa(Syamsuddin Noor)(pkt 1)	3.915.824,00
58.	Rehabilitasi Jl Ponpes Miftahul Munir(LU Utara) (pkt 1)	19.579.120,00
59.	Rehabilitasi Jl Harapan Jaya (GT Manggis) (pkt 1)	3.915.824,00
60.	Rehabilitasi Jl KH Ermas (Cempaka) (pkt 3)	6.762.525,00
61.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal tembus kuburan Muslimin Bangkal (pkt 3)	4.959.185,00
62.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Bersama/Korea (pkt 1)	14.333.256,00
63.	Pembangunan jalan Pendarapan (Akses kampus IAIN Baru) LU timur	25.298.460,00
64.	Pembuatan Jembatan Jl Usaha Tani DI Sei Lurus (Bel 623 Sungai Ulin)	4.346.100,00
65.	Pembuatan jalan Usaha tani Danau Purun(Kertak Baru-Alur) Kel Cempaka	3.380.300,00
66.	Rehabilitasi embung Sungai Besar dan pemasangan tabat limpas	965.800,00
67.	Peningkatan jalan UT tanggul palam-Handil Kyai	4.346.100,00
68.	Jembatan Jln Menuju Ponpes Yasin Guntung Manggis	22.148.550,00
69.	Jembatan Guntung Paikat Kel Guntung Paikat	27.070.450,00
70.	Box Culvert 1 Jl. Babusalam Kel Bangkal	27.348.250,00
71.	Box Culvert 2 Jl. Babusalam Kel Bangkal	7.813.500,00
72.	Box Culvert 3 Jl. Babusalam Kel Bangkal	27.347.250,00
73.	Box Culvert 4 Jl. Babusalam Kel Bangkal	15.626.000,00
74.	Peningkatan Saluran Sei Jembatan II DI Landasan Ulin Barat (lanjutan)	3.683.083.166,00
75.	Pembangunan Embung Cempaka	48.496.000,00
76.	Drainase komplek RO Ulin Lok Selatan	15.246.880,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
77.	Drainase Komplek Banua Permai Kel Sungai Besar	12.388.090,00
78.	Drainase komplek Rizky manunggal, Komplek Rizky Pesona, KelSungai Ulin	22.870.320,00
79.	Drainase Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 Kel Cempaka	11.435.160,00
80.	Drainase Komplek Mustika, Komplek Idaman Komplek Kirana KelLU Timur	11.435.160,00
81.	Drainase Gang Sawo Kel Syamsuddin Noor	5.717.580,00
82.	Drainase komplek Wella Mandiri Kel Syamsuddin Noor	11.435.160,0
83.	Drainase komplek Wengga 4 Kel LU Utara	4.764.650,00
84.	Normalisasi Drainase Jl Zam Zam Buana	50.323.900,00
85.	Pembangunan drainase Jl Jeruk Kel sungai Ulin	84.228.650,00
86.	Pembangunan drainase jalan Perambaian Kel Sungai ulin	61.464.150,00
87.	Pemasangan siring Sei Jl Handil Makmur	1.999.620,00
88.	Jaringan Pipa dia 50-75mm Jl Transad 2, 3 Guntung Manggis	8.063.100,00
89.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Jl lingkungan menuju TPS3R Gotong Royong Loktabat Selatan	2.371.500,00
90.	Gg Radar Indah	2.371.500,00
91.	Jaringan pipa interkoneksi dia 150 mm Jl perambaian koneksi Jl Jeruk Kel Sungai Ulin	8.537.400,00
92.	komplek Royal Rise Residence Kel Landasan Ulin Utara	1.897.200,00
93.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komplek Vila Mahatama Kel Syamsuddin Noor	2.371.500,00
94.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl Pembataan tembus Jl Gatot Kasturi Kel Syamsuddin Noor	1.897.200,00
95.	Komplek Putri Regensi	1.897.200,00
96.	Komplek Angkasa Raya Permai Jaringan pipa dia 50 - 75 mm	2.371.500,00
97.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mmPondok pisang	6.165.900,00
98.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Lambung Mangkurat Residence Kel Palam	7.114.500,00
99.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Graha Citra Megah	2.371.500,00
100.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan TRIKORA Kel Landasan GT. Manggis (Kec Landasan Ulin)	16.337.155,00
101.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan Cempaka Kel Cempaka (Kec Cempaka)	16.149.660,00
102.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan Palam Kel Palam (Kec Cempaka)	14.962.185,00
103.	Pembersihan Gulma saluran Tambak Buluh LU TimurPembuatan Embung Cempaka	965.800,00
	JumlahPenambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reclass Dari KIB F	11.853.472.124,00

D. Penguranganterhadap Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Koreksi Kurang Catat Tahun 2016 sebesar Rp 22.507.336,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa dia 50-75 mm Jl. Abadi III	6.697.334,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	(Kelurahan Palam)	
2.	Saluran Drainase Jalan Intan Raya	7.056.002,00
3.	Saluran Drainase Jalan Pandawa	8.754.000,00
	Jumlah Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Koreksi Tambah Catat	22.507.336,00

E. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Non Aset Tahun 2017 sebesar Rp 727.650.588,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Normalisasi Drainase Jl. Trikora Kel. Sungai Besar	142.265.113,00
2.	Jl. Trikora	107.732.394,00
3.	Normalisasi Drainase Jl. A.Yani Km.32.4 - Km.33 Kel. Loktabat Selatan	150.343.808,00
4.	Pembersihan Gulma saluran Tambak Buluh LU Timur Pembuatan Embung Cempaka	32.741.273,00
5.	Pembersihan sungai dan pengangkatan gulma terapung/padat	78.899.000,00
6.	Normalisasi Sungai GT Panggung	147.631.000,00
7.	Pembersihan sungai dan pengangkatan gulma terapung/padat	68.038.000,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Non Aset 2017	727.650.588,00

F. Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 berupa Penghapusan Tahun 2017 sebesar Rp. 5.664.408.941,06

Rincian Penghapusan Pada Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jalan Rajawali	217.413.000,00
2.	Jalan Tegal Arum Belakang	214.608.346,97
3.	Jalan Tegal Arum	1.405.687.500,00
4.	Jalan Guntung Damar	247.332.960,00
5.	Jalan Lingkar Utara	153.763.701,87
6.	Jalan Lakudat	177.493.434,91
7.	Jalan Sempati	2.862.695.972,87
8.	Jalan Lokbana	370.385.874,44
9.	Normalisasi Sei Luuk	15.028.150,00
	Total	5.664.408.941,06

G. Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Ke Tanah (KIB A) sebesar Rp. 7.955.539.751,00 terdiri dari

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Pengadaan tanah fasum untuk daerah resapan air/Embung Liang Anggang	1.437.148.000,00
2.	Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Baru Penghubung Panglima Batur - Karang Anyar	6.518.391.751,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan JaringanReklass Ke Tanah (KIB A)	7.955.539.751,00

H. Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp. 2.732.423.913,00 terdiri dari

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Inventarisasi jaringan jalan. Drainase dan jembatan kota banjarbaru	436.300.000,00
2.	Data Base Sungai Kota Banjarbaru	257.265.000,00
3.	Inventarisasi Jembatan	49.323.000,00
4.	Perencanaan teknis (pkt 1 Kec Landasan Ulin, Liang Anggang) Tahun 2018 (Pengelolaan Sungai lainnya)	50.288.000,00
5.	Perencanaan teknis (pkt 1 Kec Banjarbaru Utara, Bjb Selatan, Cempaka) Tahun 2018 (Pengelolaan Sungai lainnya)	49.576.000,00
6.	Perencanaan tehnik rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan TA. 2018	49.834.000,00
7.	Perencanaan tehnik pembangunan jembatan Th 2018	80.823.000,00
8.	Perencanaan teknis I 2018 (Landasan Ulin)	48.696.000,00
9.	Perencanaan teknis II 2018 (Kec Liang Anggang)	48.110.000,00
10.	Perencanaan teknis III 2018 (Cempaka , BJB Utara)	47.230.000,00
11.	Perencanaan teknis air minum paket I TA 2018	47.836.108,00
12.	Perencanaan teknis air minum paket II TA 2018	46.818.898,00
13.	Perencanaan teknis drainase paket I TA 2018	47.595.355,00
14.	Perencanaan teknis drainase paket II TA 2018	47.418.552,00
15.	Perencanaan Teknis Normalisasi Drainase Jalan Kota 2018	221.485.000,00
16.	Perencanaan teknis pembangunan drainase Jl Kota 2018	188.674.000,00
17.	Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jalan 2018	192.940.000,00
18.	Perencanaan tehnik rehabilitasi/pemeliharaan DAK 2018	193.215.000,00
19.	Perencanaan Tehnik pembangunan Jalan 2018 (KDP)	211.079.000,00
20.	Perencanaan tehnik pembangunan jalan DAK 2018	183.205.000,00
21.	Perencanaan leger Jalan (tahap II)	234.712.000,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan JaringanReklass Ke Aset Tetap lainnya(KIB E)	2.732.423.913,00

I. Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp. 9.308.013.888,00 terdiri dari

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Jembatan Gantung manggis dan Jembatan Jl Peramuang Ujung Kel Gt Manggis Kec Landasan Ulin	6.458.777.902,00
2.	Normalisasi drainase Jl RO Ulin Lok Selatan	2.849.235.986,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	9.308.013.888,00

5.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp.7.634.840.604,00** dan **Rp.4.365.602.691,00** terjadi Penambahan aset tetap lainnya untuk tahun 2017 sebesar Rp.3.269.237.913,00 atau sebesar 74,89% dari total aset Tetap Lainnya tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017

(Rp)

7.634.840.604,00

31 Desember 2016

(Rp)

4.365.602.691,00

No.	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
1.	Saldo Awal 2016	4.365.602.691,00
2.	Koreksi - Catat	78.000,00
3.	Mutasi + Perubahan SOPD	33.013.000,00
4.	Saldo Awal 2017	4.398.537.691,00
5.	Belanja Modal	197.500.000,00
6.	Reklas Dari KIB C	257.204.000,00
7.	Reklas Dari KIB D	2.732.423.913,00
8.	Reklas Dari KIB F	49.175.000,00
9.	Saldo Akhir 2017	7.634.840.604,00

- A. Pengurangan Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2016 sebesar Rp. 78.000,00 Koreksi Kurang Catat berupa Buku - buku Industri Konstruksi dan Perdagangan
- B. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp 33.013.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Peta (MAP)	24.013.000,00
2.	Peta (MAP)	4.000.000,00
3.	Peta (MAP)	5.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah Perubahan SOPD Aset Tetap Lainnya	33.013.000,00

- C. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal tahun 2017 sebesar Rp 197.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Alat olah raga lainnya (Fitnes Outdoor) Wella Mandiri	88.824.000,00
2.	Alat olah raga lainnya (Fitnes Outdoor) Taman Palm Megatama	108.676.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.500.000,00

- D. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Reklasdari Gedung Bangunan (KIB C)tahun 2017sebesarRp 257.204.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Honor Alat olah raga lainnya (Fitnes Outdoor) Wella Mandiri	510.000,00
2.	Honor Alat olah raga lainnya (Fitnes Outdoor) Taman Palm Megatama	510.000,00
3.	Pembangunan gedung serbaguna Kel Sei Tiung(KDP 2017)	49.199.000,00
4.	Perencanaan teknis master plan /Desain RTH Embung Lokudat Guntung Payung	49.565.000,00
5.	Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin (KDP 2017)	157.420.000,00
	JumlahReklass Dari Gedung Dan Bangunan (KIB C)	257.204.000,00

- E. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Reklass DariJalan Irigasi Dan Jaringan (KIB D)tahun 2017 sebesarRp2.732.423.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Inventarisasi jaringan jalan. Drainase dan jembatan kota banjarbaru	436.300.000,00
2.	Data Base Sungai Kota Banjarbaru	257.265.000,00
3.	Inventarisasi Jembatan	49.323.000,00
4.	Perencanaan teknis (pkt 1 Kec Landasan Ulin, Liang Anggang) Tahun	50.288.000,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	2018 (Pengelolaan Sungai lainnya)	
5.	Perencanaan teknis (pkt I Kec Banjarbaru Utara, Bjb Selatan, Cempaka) Tahun 2018 (Pengelolaan Sungai lainnya)	49.576.000,00
6.	Perencanaan tehnis rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan TA. 2018	49.834.000,00
7.	Perencanaan tehnis pembangunan jembatan Th 2018	80.823.000,00
8.	Perencanaan teknis I 2018 (Landasan Ulin)	48.696.000,00
9.	Perencanaan teknis II 2018 (Kec Liang Anggang)	48.110.000,00
10.	Perencanaan teknis III 2018 (Cempaka , BJB Utara)	47.230.000,00
11.	Perencanaan teknis air minum paket I TA 2018	47.836.108,00
12.	Perencanaan teknis air minum paket II TA 2018	46.818.898,00
13.	Perencanaan teknis drainase paket I TA 2018	47.595.355,00
14.	Perencanaan teknis drainase paket II TA 2018	47.418.552,00
15.	Perencanaan Teknis Normalisasi Drainase Jalan Kota 2018	221.485.000,00
16.	Perencanaan teknis pembangunan drainase Jl Kota 2018	188.674.000,00
17.	Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jalan 2018	192.940.000,00
18.	Perencanaan tehnis rehabilitasi/pemeliharaan DAK TA. 2018	193.215.000,00
19.	Perencanaan Tehnis pembangunan Jalan 2018 (KDP)	211.079.000,00
20.	Perencanaan tehnis pembangunan jalan DAK 2018	183.205.000,00
21.	Perencanaan leger Jalan (tahap II)	234.712.000,00
	Jumlah Reklass Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan (KIB D)	2.732.423.913,00

F. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Reklass Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) tahun 2017 sebesar Rp 49.175.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Rehabilitasi Tribun dan Jogging Track

5.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. **11.123.529.119,00** dan Rp. **18.924.309.269,00** . Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tahun 2016 menurun Rp.- 7.800.780.150,00 atau sebesar-41,22% dari total Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
11.123.529.119,00	18.924.309.269,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2016	18.924.309.269,00
2	Penambahan :	
	a. Reclass Dari KIB C	1.815.515.231,00
	b. Reclass Dari KIB D	9.308.013.888,00
	Jumlah Penambahan	30.047.838.388,00
3	Pengurangan :	
	a. Reclass Ke KIB C	7.021.662.145,00
	b. Reclass Ke KIB D	11.853.472.124,00
	c. Reclass Ke KIB E	49.175.000,00
	Jumlah Pengurangan	18.924.309.269,00
	Saldo Awal 2017	11.123.529.119,00

A. Penambahan Aset Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2017 Reclass Dari KIB C sebesar Rp 1.815.515.231,00 yaitu Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al Munawarrah Kota Banjarbaru Kelurahan Kemuning.

B. Penambahan Aset Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2017 sebesar Rp 9.308.013.888 sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Jembatan Gantung manggis dan Jembatan Jl Peramuhan Ujung Kel Gt Manggis Kec Landasan Ulin	6.458.777.902,00
2.	Normalisasi drainase Jl RO Ulin Lok Selatan	2.849.235.986,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reklass Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	9.308.013.888,00

C. Adanya Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun 2017 sebesar Rp 7.021.662.145,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru

D. Adanya Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun 2017 sebesar Rp 11.853.472.124,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl. Nusantara	3.901.830,00
2.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Karang Anyar II(pkt 2) (KDP 2016)	37.624.797,00
3.	Rehabilitasi Jalan Gotong Royong (Syamsuddin Noor) (pkt 1) (KDP 2016)	6.363.214,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
4.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Al Manar (pkt 2) (KDP 2016)	3.224.983,00
5.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Sukarelawan (pkt 2) (KDP 2016)	7.524.959,00
6.	Pelebaran Jalan Barjad Lok Utara (KDP 2016)	168.656.400,00
7.	Pembangunan jalan UPT Trans Kel Cempaka (KDP 2016)	75.895.380,00
8.	Rehabilitasi Jl Alternatif Trans (Cempaka (pkt 3) (KDP 2016)	10.820.040,00
9.	Rehabilitasi Jl Mujahidin (Cempaka) (pkt 3) (KDP 2016)	901.670,00
10.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Mawar (pkt 1) (KDP 2016)	28.666.512,00
11.	Pembangunan jalan peramuhan Ujung (lanjutan) LU tengah) (KDP 2016)	134.756.050,00
12.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Raya (LU Timur)(pkt 1) (KDP 2016)	9.789.560,00
13.	Rehabilitasi Jl Sidomulyo Selatan (LU Timur)(pkt 1) (KDP 2016)	5.384.258,00
14.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Warga Tunggal (pkt 3) (KDP 2016)	5.574.044,00
15.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Gaharu (pkt 3) (KDP 2016)	3.901.831,00
16.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Pangeran Suriansyah Ujung (pkt 1) (KDP 2016)	28.666.512,00
17.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Teratai (pkt 1) (KDP 2016)	8.958.285,00
18.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Mawar (pkt 1) (KDP 2016)	3.583.314,00
19.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Sumber Sari (pkt 3) (KDP 2016)	25.640.602,00
20.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Unlam III menuju Sumber Sari (pkt 3) (KDP 2016)	1.114.809,00
21.	Pembangunan Jl Tambak Langsung (lanjutan) Syamsuddin Noor	109.626.660,00
22.	Rehabilitasi Jl Sapta Marga (pkt 2) (KDP 2016)	34.778.700,00
23.	Pembangunan jalan Guntung Manggis (lanjutan) (pkt 1) (KDP 2016)	72.560.950,00
24.	Rehabilitasi Jl Kuburan Muslimin Bangkal (pkt 3) (KDP 2016)	10.369.205,00
25.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal (pkt 3) (KDP 2016)	11.270.875,00
26.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Kemuning (pkt 3)(KDP 2016)	12.820.301,00
27.	Pembuatan jembatan Jl UT Handil Kyai DI Bangkal (KDP 2016)	4.346.100,00
28.	Peningkatan saluran Handil Kyai DI Bangkal (lanjutan) (KDP 2016)	10.207.260,00
29.	Peningkatan Jalan UT Tanggul DI Palam (KDP 2016)	4.346.100,00
30.	Rehabilitasi Siring Sei Kemuning (Jembatan Kemuning - Jembatan GT Lua) (KDP 2016)	8.578.780,00
31.	Rehabilitasi siring Sei Ujung Murung (KDP 2016)	19.228.300,00
32.	Peningkatan Saluran Lukudat DI Guntung Payung	4.349.236.710,00
33.	Pelebaran jembatan Embung Sidodadi (KDP 2016)	3.380.300,00
34.	Normalisasi drainase Jl Zam-Zam Jailani (KDP 2016)	54.898.800,00
35.	Pembangunan drainase Jl Bukit Raya Kel Lok Selatan (KDP 2016)	29.593.850,00
36.	Pembangunan drainase jalan Batas Kota Dalam Kel Sungai Ulin (KDP 2016)	52.358.350,00
37.	Pembangunan Drainase Jalan Peramuhan	1.903.829.489,00
38.	Jl Kaca Piring(pkt 1)(KDP 2016)	5.374.971,00
39.	Pembangunan jalan Tercapai (lanjutan) LUB (KDP 2016)	42.164.100,00
40.	Rehabilitasi Revitalisasi bangunan air Sei Lukudat DI Guntung Payung (KDP 2016)	4.346.100,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
41.	Rehabilitasi Pemeliharaan Sei Besar dan Sei Kemuning (KDP 2016)	1.774.920,00
42.	Normalisasi drainase Jl Pangeran Suriansyah (Lanjutan) (KDP 2016)	20.587.050,00
43.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Bina Marga (pkt 3)(KDP 2016)	2.787.022,00
44.	Peningkatan Saluran Sei Tempurau DI Bangkal (KDP 2016)	4.346.100,00
45.	Normalisasi Pembuatan Sal Sekunder Tambak Jariyah- Daya Sakti (KDP 2016)	3.863.200,00
46.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DI Bangkal dan Rehabilitasi (KDP 2016)	965.800,00
47.	Rehabilitasi Bangunan Pelimpas Embung Gunung Kapur (KDP 2016)	2.414.500,00
48.	Normalisasi saluran Sei Tegal Arum DI Syamsuddin Noor (KDP 2016)	3.380.300,00
49.	Normalisasi drainase Jl Basuki Rahmad Kel Komet (KDP 2016)	102.935.250,00
50.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Ambulung (KDP 2016)	9.498.195,00
51.	Pemasangan siring dinding Penahan Sei Rancah (KDP 2016)	5.998.860,00
52.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Kampung Gumpal (KDP 2016)	14.997.150,00
53.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sidomulyo (KDP 2016)	1.999.620,00
54.	Normalisasi Saluran Kuranji (Inlet) dan dan saluran Sei Basung (outlet) embung Cempaka (KDP 2016)	2.897.400,00
55.	Pemasangan siring dinding penahan Sei Sumba	15.497.055,00
56.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Karang Anyar II (pkt 2)	5.374.971,00
57.	Rehabilitasi Jl Airbus/ Angkasa(Syamsuddin Noor)(pkt 1)	3.915.824,00
58.	Rehabilitasi Jl Ponpes Miftahul Munir(LU Utara)(pkt 1)	19.579.120,00
59.	Rehabilitasi Jl Harapan Jaya (GT Manggis) (pkt 1)	3.915.824,00
60.	Rehabilitasi Jl KH Ermas (Cempaka) (pkt 3)	6.762.525,00
61.	Rehabilitasi Jl Min Bangkal tembus kuburan Muslimin Bangkal (pkt 3)	4.959.185,00
62.	Rehabilitasi / pemeliharaan Jl Bersama/Korea (pkt 1)	14.333.256,00
63.	Pembangunan jalan Pendarapan (Akses kampus IAIN Baru) LU timur	25.298.460,00
64.	Pembuatan Jembatan Jl Usaha Tani DI Sei Lurus (Bel 623 Sungai Ulin)	4.346.100,00
65.	Pembuatan jalan Usaha tani Danau Purun(Kertak Baru-Alur) Kel Cempaka	3.380.300,00
66.	Rehabilitasi embung Sungai Besar dan pemasangan tabat limpas	965.800,00
67.	Peningkatan jalan UT tanggul palam-Handil Kyai	4.346.100,00
68.	Jembatan Jln Menuju Ponpes Yasin Guntung Manggis	22.148.550,00
69.	Jembatan Guntung Paikat Kel Guntung Paikat	27.070.450,00
70.	Box Culvert 1 Jl. Babusalam Kel Bangkal	27.348.250,00
71.	Box Culvert 2 Jl. Babusalam Kel Bangkal	7.813.500,00
72.	Box Culvert 3 Jl. Babusalam Kel Bangkal	27.347.250,00
73.	Box Culvert 4 Jl. Babusalam Kel Bangkal	15.626.000,00
74.	Peningkatan Saluran Sei Jembatan II DI Landasan Ulin Barat (lanjutan)	3.683.083.166,00
75.	Pembangunan Embung Cempaka	48.496.000,00
76.	Drainase komplek RO Ulin Lok Selatan	15.246.880,00
77.	Drainase Komplek Banua Permai Kel Sungai Besar	12.388.090,00
78.	Drainase komplek Rizky manunggal, Komplek Rizky Pesona, Kel Sungai Ulin	22.870.320,00
79.	Drainase Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 Kel Cempaka	11.435.160,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
80.	Drainase Komplek Mustika, Komplek Idaman Komplek Kirana KelLU Timur	11.435.160,00
81.	Drainase Gang Sawo Kel Syamsuddin Noor	5.717.580,00
82.	Drainase komplek Wella Mandiri Kel Syamsuddin Noor	11.435.160,0
83.	Drainase komplek Wengga 4 Kel LU Utara	4.764.650,00
84.	Normalisasi Drainase Jl Zam Zam Buana	50.323.900,00
85.	Pembangunan drainase Jl Jeruk Kel sungai Ulin	84.228.650,00
86.	Pembangunan drainase jalan Perambaian Kel Sungai ulin	61.464.150,00
87.	Pemasangan siring Sei Jl Handil Makmur	1.999.620,00
88.	Jaringan Pipa dia 50-75mm Jl Transad 2, 3 Guntung Manggis	8.063.100,00
89.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Jl lingkungan menuju TPS3R Gotong Royong Loktabat Selatan	2.371.500,00
90.	Gg Radar Indah	2.371.500,00
91.	Jaringan pipa interkoneksi dia 150 mm Jl perambaian koneksi Jl Jeruk Kel Sungai Ulin	8.537.400,00
92.	komplek Royal Rise Residence Kel Landasan Ulin Utara	1.897.200,00
93.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Komplek Vila Mahatama Kel Syamsuddin Noor	2.371.500,00
94.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mm Jl Pembataan tembus Jl Gatot Kasturi Kel Syamsuddin Noor	1.897.200,00
95.	Komplek Putri Regensi	1.897.200,00
96.	Komplek Angkasa Raya Permai Jaringan pipa dia 50 - 75 mm	2.371.500,00
97.	Jaringan pipa dia 50 - 75 mmPondok pisang	6.165.900,00
98.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Lambung Mangkurat Residence Kel Palam	7.114.500,00
99.	Jaringan pipa dia 50 - 100 mm Komplek Graha Citra Megah	2.371.500,00
100.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan TRIKORA Kel Landasan GT. Manggis (Kec Landasan Ulin)	16.337.155,00
101.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan Cempaka Kel Cempaka (Kec Cempaka)	16.149.660,00
102.	Optimalisasi MBR pipa 50 - 100 mm pengembangan kawasan Palam Kel Palam (Kec Cempaka)	14.962.185,00
103.	Pembersihan Gulma saluran Tambak Buluh LU TimurPembuatan Embung Cempaka	965.800,00
	JumlahPenambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Reclass Dari KIB F	11.853.472.124,00

- B. Adanya Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun 2017Reklass Ke Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp 7.021.662.145,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyaitu Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru.**
- C. Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun 2017 Reklass Ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp 14.175.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyaitu Perencanaan Teknis Rehabilitasi Tribun dan Jogging Track**

5.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
(651.113.182.067,20)	(537.937.565.499,32)

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.056.099.318,76
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	284.818.290,63
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	646.698.911.857,81
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	73.352.600,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2017		651.113.182.067,20

5.2.2.8 Dana Cadangan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)

5.2.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.**13.124.626.372,25** dan Rp.**19.495.975.129,00**. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp. -6.371.348.756,75 atau (32,68)% dari saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016, yang disebabkan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain karena perubahan status aset dari baik menjadi rusak berat. Adapun rincian Aset Lain-lain sebagai berikut:

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
13.124.626.372,25	19.495.975.129,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2017	19.495.975.129,00
3	Penambahan :	
	a. Reclass Antar KIB	13.256.915,25
	Jumlah Penambahan	13.256.915,25
4	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	6.384.605.672,00
	Jumlah Pengurangan	6.384.605.672,00
5	Saldo Akhir 2017	13.124.626.372,25

A. Penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2017 sebesar Rp 13.256.915,25 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1	Air Conditioning Unit	3.400.000,00
2	Printer	4.850.000,00
3	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
4	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
5	Printer	2.006.915,25
	Jumlah	13.256.915,25

B. Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun 2017 sebesar Rp. 6.384.605.672,00

Penghapusan di Aset Lainnya Aset Rusak Berat sebesar Rp. 933.878.800,00

Penghapusan di Aset Lainnya Dimanfaatkan Pihak Lain sebesar Rp. 5.450.726.872,00

5.2.3.1 Tuntutan Ganti Rugi

5.2.3.2 Aset Tak Berwujud

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

No	Uraian	
1	Saldo awal	
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2017	
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2017	
	b. Belanja Barang jasa 2017	
	c. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	
	b. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	
	Total Penambahan Tahun 2017	
	Jumlah	

A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap tak berwujud tahun

B. Koreksi tambah atas saldo aset tak berwujud tahun

No	SKPD	Nilai (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		

J. Pengurangan aset tak berwujud sebesar Rp di karenakan hal-hal sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)
TOTAL	

5.2.3.3 Amortisasi Aset Tak Berwujud

**31 Desember 2017
(Rp)**

**31 Desember 2016
(Rp)**

=====

4.3.5 Kewajiban

**31 Desember 2017
(Rp)
205.026.718.398,00**

**31 Desember 2016
(Rp)
-**

(Rupiah)

No	Uraian	31-Des-17	31-Des-2016
1	Utang Beban	503.340,00	
2	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	205.026.215.058,00	
JUMLAH		205.026.718.398,00	

4.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

**31 Desember 2017
(Rp)
-**

**31 Desember 2016
(Rp)
-**

4.3.5.3 Utang Bunga

**31 Desember 2017
(Rp)
-**

**31 Desember 2016
(Rp)
-**

4.3.5.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

**31 Desember 2017
(Rp)
-**

**31 Desember 2016
(Rp)
-**

4.3.5.5 Pendapatan Diterima Dimuka

**31 Desember 2017
(Rp)
-**

**31 Desember 2016
(Rp)
-**

5.3.2.6 UtangBeban

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
503.340,00	-

Utang Beban sebesar Rp. 503.340,00 berupa Pembayaran PDAM tahun 2017

5.3.2.7 UtangJangkaPendeklainnya

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.2.8 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
205.026.215.058,00	-

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>(2.456.054.782,77)</u>	<u>17.000.000,00</u>

Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	(10.408.015.400,00)	17.000.000,00	350
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	-	-
4	Surplus Non Operasional – LO	7.951.960.617,23	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-
TOTAL		(2.456.054.782,77)	17.000.000,00	350

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>(10.408.015.400,00)</u>	<u>17.000.000,00</u>

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	76.500.000,00	17.000.000,00	350
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	(10.484.515.400,00)	-	-
TOTAL		(10.408.015.400,00)	17.000.000,00	350

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

5.3.1.1.2 PendapatanRetribusi Daerah-LO

31 Desember 2017
(Rp)
76.500.000,00

31 Desember 2016
(Rp)
17.000.000,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Keterangan	SaldoTahun 2016	Saldotahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	RetribusiPelayananKesehatan - LO				-
2	RetribusiPelayananPersampahan/ Kebersihan - LO				-
3	RetribusiPelayananParkir di TepiJalanUmum - LO				-
4	RetribusiPelayananPasar - LO				-
5	RetribusiPengujianKendaraanBermotor - LO				-
6	RetribusiPengendalianMenara Telekomunikasi – LO				-
7	RetribusiPemakaianKekayaan Daerah - LO	17.000.000,00	76.500.000,00	59.500.000,00	350
8	Retribusi Terminal - LO				-
9	RetribusiTempatKhususParkir - LO				-
10	RetribusiTempatRekreasi dan Olah raga- LO				-
11	RetribusiPenjualanProduksi Usaha Daerah –LO				-
12	RetribusiIzinMendirikanBangunan - LO				-
13	RetribusiIzinGangguan– LO				-
14	RetribusiIzinTrayek - LO				-
TOTAL					

5.3.1.1.3 HasilPengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2017
(Rp)
0

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.1.1.4 Lain-Lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah-LO

31 Desember 2017
(Rp)
(10.484.515.400,00)

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.1.2 Surplus Non Operasional-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>7.951.960.617,23</u>	<u>0</u>

Rincian Surplus Non Operasional-LO

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	7.951.960.617,23	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya-LO	-	-	-
TOTAL		7.951.960.617,23	17.000.000,00	350

4.4.1.2.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>7.951.960.617,23</u>	<u>0</u>

4.4.1.2.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

4.4.1.2.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

5.3.2 Beban-LO

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

31 Desember 2017

(Rp)

138.378.931.019,05

31 Desember 2016

(Rp)

120.099.987.846,95

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1.	BebanOperasi	132.928.204.147,05	116.379.178.368,95	14,22
2.	Beban Transfer	-	-	-
3.	Defisit Non Operasional	5.450.726.872,00	3.720.809.478,00	46,49
TOTAL		138.378.931.019,05	120.099.987.846,95	15,22

5.3.2.1 BebanOperasi

31 Desember 2017

(Rp)

132.928.204.147,05

31 Desember 2016

(Rp)

116.379.178.368,95

Rincian Beban Operasi

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	BebanPegawai	4.403.590.368,00	4.119.699.454,00	6,89
2	BebanBarangdanJasa	11.623.173.535,00	7.794.728.787,02	49,12
3	BebanHibah	-	-	-
4	BebanBantuanSosial	-	-	-
5	BebanPenyusutandanAmortisasi	116.901.440.244,05	104.464.750.129,93	11,91
6	BebanPenyisihanPiutang	-	-	-
TOTAL		132.928.204.147,05	116.379.178.368,95	14,22

5.3.2.1.1 BebanPegawai

31 Desember 2017

(Rp)

4.403.590.368,00

31 Desember 2016

(Rp)

4.119.699.454,00

BebanPegawaiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.403.590.368,00. Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut :

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Keterangan	SaldoTahun 2016	Saldotahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	BebanGajidanTunjangan	2.975.358.204,00	3.085.849.118,00	110.490.914,00	3,71
2	BebanTambahannyaPenghasilan PNS	1.143.891.250,00	1.269.641.250,00	125.750.000,00	10,99
3	BebanPenerimaanlainnyaPimpinandananggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	BebanBiayaPemungutanPajak Daerah	-	-	-	-
5	BebanPenghasilanLainnya	-	-	-	-
6	Beban Honorarium PNS	450.000,00	48.100.000,00	47.650.000,00	10,589
7	Beban Honorarium Non PNS	-	-	-	-
8	BebanUangLembur	-	-	-	-
9	BebanUanguntukdiberikankepadaPihakKetiga/Masyarakat	-	-	-	-
10	BebanBelanjaPegawaiOperasional BLUD	-	-	-	-
		4.119.699.454,00	4.403.590.368,00	283.890.914,00	6,89

5.3.2.1.2 BebanBarang Dan Jasa

31 Desember 2017

(Rp)

11.623.173.535,00

31 Desember 2016

(Rp)

7.794.728.785,02

No	Keterangan	SaldoTahun 2016	Saldotahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	BelanjaBahanPakaiHabis		1.057.011.295,00		
2	BelanjaBahan/Material				
3	BelanjaJasa Kantor		189.357.157,00		
4	BelanjaPremiAsuransi				
5	BelanjaPerawatanKendaraan Bermotor		156.284.264,00		
6	BelanjaCetakdanPenggandaan		95.076.800,00		
7	BelanjaSewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir				
8	BelanjaSewaSaranaMobilitas				
9	BelanjaSewaAlatBerat				
10	BelanjaSewaPerlengkapandanPeralatan Kantor				
11	BelanjaMakanandanMinuman		215.295.500,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

No	Keterangan	Saldo Tahun 2016	Saldo tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
13	Belanja Pakaian Kerja		8.000.000,00		
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				
15	Belanja Perjalanan Dinas		311.772.058,00		
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				
18	Belanja Pemeliharaan		3.197.687.461,00		
19	Belanja Jasa Konsultansi		300.130.000,00		
20	Belanja Honorarium Non PNS		312.840.000,00		
21	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		5.779.719.000,00		
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
23	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya				
			11.623.173.535,00		

5.3.2.1.3 Beban Hibah

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0	0

5.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0	0

5.3.2.1.5 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

116.901.440.244,05

104.464.750.129,93

No	SKPD	Total
1	PeralatandanMesin	781.007.836,78
2	GedungdanBangunan	279.344.790,62
3	Jalan, Irigasi, danJaringan	115.790.167.416,65
4	AsetTetapLainnya	50.920.200,00
5	AsetTakBerwujud	-
	TOTAL	116.901.440.244,05

5.3.2.1.6 BebanPenyisihanPiutang

31 Desember 2017
(Rp)
0

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.2.1.7 BebanPegawai BOS

31 Desember 2017
(Rp)
0

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.2.1.8 BebanPegawai BOS

31 Desember 2017
(Rp)
0

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.2.2 Beban Transfer

31 Desember 2017
(Rp)
0

31 Desember 2016
(Rp)
0

5.3.2.2.1 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2017
(Rp)

31 Desember 2016
(Rp)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

5.450.726.872,00

3.720.809.478,00

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/ DefisitKegiatanOperasional		-	-
2	Beban Transfer		-	-
3	Defisit Non Operasional	5.450.726.872,00	3.720.809.478,00	-
Jumlah		5.450.726.872,00	3.720.809.478,00	-

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 ArusKas dariAktivitasOperasi

**31 Desember 2015
(Rp)**

374.996.574.458,99

**31 Desember 2014
(Rp)**

306.265.127.805,56

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas Operasional.

Pada tahun 2015 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp374.996.574.458,99 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp981.310.994.406,17 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp606.314.419.947,18. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah Pajak Daerah	68.932.836.195,91	62.610.328.954,23
Penerimaan Retribusi Daerah	8.299.113.822,00	10.627.078.693,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.242.786.972,00	4.518.246.508,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.028.907.741,26	46.744.890.450,33
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.478.060.450,00	16.478.060.450,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	133.456.300.457,00	133.456.300.457,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	393.734.908.000,00	393.734.908.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	117.666.520.000,00	117.666.520.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	59.175.830.000,00	74.218.618.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.112.550.768,00	90.179.882.141,00
Penerimaan Lainnya	23.183.180.000,00	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	
JUMLAH	981.310.994.406,17	950.234.833.653,56

Sedangkan arus kas keluar, dari arus keluar aktivitas operasi dapat dirincikan pada tabel berikut:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	392.376.691.253,00	364.526.005.321,00
Pembayaran Barang	190.596.958.392,18	166.087.438.700,00
Pembayaran Hibah	19.958.583.000,00	3.361.184.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.540.611.800,00	5.092.747.100,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	841.575.502,00	647.788.481,00
Pembayaran Tak Terduga		792.750.000,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-
JUMLAH	606.314.419.947,18	540.507.913.602,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset non Keuangan

**31 Desember 2015
(Rp)
-338.552.329.745,20**

**31 Desember 2014
(Rp)
282.429.998.281,00**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp-,338.552.329.745,20 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp139.423.411.680,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp477.975.741.425,20 Rincian aliran Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Masuk Kas	-	-
Pencairan Dana Cadangan	138.269.761.680,00	-
Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	1.153.650.000,00	-
TOTAL	139.423.411.680,00	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

Sedangkan arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	12.553.232.600,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	80.355.441.841,00	-
Perolehan Bangunan dan Gedung	175.603.669.235,20	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.866.065.026,00	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.898.244.876,00	-
Perolehan Aset Lainnya	545.289.500,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	480.923.698.202,20	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(341.500.286.522,20)	-

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
15.000.000.000,00	10.730.238.320,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp15.000.000.000,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

ArusMasukKas		
Pencairan Dana Cadangan	-	37.430.238.320,00
JumlahArusMasukKas	-	37.430.238.320,00
ArusKeluarKas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	15.700.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00
JumlahArusKeluarKas	15.000.000.000,00	26.700.000.000,00
ArusKasBersihdariAktivitasPendanaan/Pembiayaan	(15.000.000.000,00)	10.730.238.320,00

5.5.4 ArusKas dariAktivitasTransitoris

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dariAktivitasTransitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus KasBersihdariAktivitas Transitoris sebesar Rp0,00adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesarRp88.617.060.494,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp88.617.060.494,00. Rincian aliran KasdariAktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

ArusKasdariAktivitasTransitoris/Non Anggaran	Tahun 2015	Tahun 2014
ArusMasukKas		
PenerimaanPerhitunganFihakKetiga (PFK)	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
JumlahArusMasukKas	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
ArusKeluarKas		
PengeluaranPerhitunganFihakKetiga (PFK)	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
JumlahArusKeluarKas	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
ArusKasBersihdariAktivitasTransitoris/Non Anggaran	0,00	0,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

5.5.5 Saldo Akhir Kas di BUD

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
<u>204.911.940.977,88</u>	<u>285.711.040.075,09</u>

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 204.911.940.977,88 yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Kenaikan / Kas	21.444.244.713,79	138.027.160.090,56
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	182.249.247.829,09	147.683.879.984,53
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	203.693.492.542,88	285.711.040.075,09
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerima	2.082.500,00	-
Saldo Akhir Kas Lain Lain	1.216.365.935,00	0
Saldo Akhir Kas	204.911.940.977,88	285.711.040.075,09

5.4 . LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	2017
EKUITAS AWAL	954.956.099.107,39
SURPLUS/DEFISIT-LO	(140.834.985.801,82)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Kurang Catat Kas	-
Koreksi Lebih Catat Kas	-
Koreksi Kurang Catat Piutang	
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	-
Koreksi Lebih Catat Piutang	-
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	-
Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD	-
Mutasi Kurang Persediaan Karena Perubahan SOPD	-
Koreksi Kurang Catat Nilai Persediaan 2017	-
Koreksi Lebih Catat Nilai Persediaan 2017	-
Akumulasi Extracomptable Menjadi Aset 2016	-
Akumulasi Aset Menjadi Extracomptable 2016	-
Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016	9.020.733,60
Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016	(182.024.200,00)
Aset Jadi Extracomptable 2016	-
Extracomptable Jadi Aset 2016	-
Lebih Catat Aset Tahun 2016	(29.355.336,00)
Kurang Catat Aset 2016	3.640.484.000,00)
Mutasi Kurang Aset Perubahan SKPD	-
Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Perubahan SKPD	-
Mutasi Tambah Aset Perubahan SKPD	4.602.706.930,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD	(261.081.576,00)
Mutasi Kurang Antar SKPD	(7.271.488.375,00)
Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Antar SKPD	-
Mutasi Tambah Antar SKPD	-
Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Antar SKPD	-
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan 2016	(4.088.818.800,00)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan 2016	-
Reklasifikasi Menjadi Extracomptable Tahun Berjalan	(25.154.100,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	(16.829.028,27)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	-
Mutasi Kurang Aset Diserahkan Ke Pihak Lain	-
Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Aset Diserahkan Ke Pihak Lain	-
Koreksi Ekuitas Lain - Lain	184.974.072,64
EKUITAS AKHIR	810.683.547.596,54

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016 pada Peralatan dan Mesin	6.770.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.250.733,60
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016	9.020.733,60

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan	(182.024.200,00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016	(182.024.200,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Lebih Catat Aset 2016 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu Pembangunan jaringan dan pengambilan tegangan langsung dari Gardu Induk Cempaka untuk melayani Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru	3.640.484.000,00
	Jumlah Lebih Catat Aset 2016	3.640.484.000,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Lebih Catat Aset 2016 pada Peralatan dan Mesin berupa Concrete Vibrator	(6.770.000,00)
2.	Lebih Catat Aset 2016 Pada Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari	
	- Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa dia 50-75 mm Jl. Abadi III (Kelurahan Palam)	(6.697.334,00)
	- Saluran Drainase Jalan Intan Raya	(7.056.002,00)
	- Saluran Drainase Jalan Pandawa	(8.754.000,00)
3.	Lebih Catat Aset 2016 pada Aset Tetap Lainnya berupa Buku - buku Industri Konstruksi dan Perdagangan	(78.000,00)
	Jumlah Lebih Catat Aset 2016	(29.355.336,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
----	--------	--------------

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2017

1.	Tanah	4.099.916.771,00
2.	Peralatan dan Mesin	360.307.159,00
3.	Gedung dan Bangunan	109.470.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	33.013.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah Aset Perubahan SKPD	4.602.706.930,00

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD pada Peralatan dan Mesin	(255.608.076,00)
2.	Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD pada Gedung dan Bangunan	(5.473.500,00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD	(261.081.576,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Depo Arsip Pemerintah Kota Banjarbaru	(1.643.848.375,00)
2.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Kemuning	(796.793.500,00)
3.	Pembangunan RSUD Kota Banjarbaru	(4.410.836.500,00)
4.	Rehabilitasi Gor Rudy Resnawan Kota Banjarbaru	(212.455.551,00)
5.	Rehabilitasi Tanggapan Lantai Mesjid Agung Al Munawwarah	(207.554.449,00)
	Jumlah Mutasi Kurang Antar SKPD Tahun 2017	(7.271.488.375,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2016	(4.088.818.800,00)
	Jumlah Koreksi Catat Akumulasi Penyusutan Tahun 2016	(4.088.818.800,00)

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1.	02.02.02.03.02	Cutter	(4.269.600,00)
2.	02.04.02.11.03	Rol Meter	(261.600,00)
3.	02.04.02.11.03	Rol Meter	(325.000,00)
4.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	(404.300,00)
5.	02.04.02.11.04	Jangka Berkala	(727.800,00)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2017

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
6.	02.06.04.01.08	MejaKerjaPegawai Non Struktural	(18.750.000,00)
7.	02.09.01.06.67	Concrete Hammer Test	(415.800,00)
Jumlah Reklasifikasi Menjadi Extracomptable Tahun Berjalan			(25.154.100,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	(16.829.028,27)
	JumlahKoreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	(16.829.028,27)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menggunakan system akuntansi berbasis computer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub system keuangan yang terpisah dari SIKD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2017 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Umum Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di masa selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2017 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2017, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, 2017

Kepala Dinas

Ir. JAYA KRESHNA
NIP. 19631105 199302 1 002



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	(2.456.054.782,77)	17.000.000,00	(2.473.054.782,77)	(14.547,38)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	(10.408.015.400,00)	17.000.000,00	(10.425.015.400,00)	(61.323,62)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	76.500.000,00	17.000.000,00	59.500.000,00	350,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	(10.484.515.400,00)	0,00	(10.484.515.400,00)	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	7.951.960.617,23	0,00	7.951.960.617,23	0,00
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	7.951.960.617,23	0,00	7.951.960.617,23	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	138.378.931.019,05	120.099.987.846,95	18.278.943.172,10	15,22
9 . 1	BEBAN OPERASI	132.928.204.147,05	116.379.178.368,95	16.549.025.778,10	14,22
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	4.403.590.368,00	4.119.699.454,00	283.890.914,00	6,89
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	11.623.173.535,00	7.794.728.785,02	3.828.444.749,98	49,12
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.901.440.244,05	104.464.750.129,93	12.436.690.114,12	11,91
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.450.726.872,00	3.720.809.478,00	1.729.917.394,00	46,49
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Akibat Penghapusan Aset - LO	5.450.726.872,00	0,00	5.450.726.872,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit Akibat Penghapusan Piutang - LO	0,00	3.720.809.478,00	(3.720.809.478,00)	(100,00)
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(140.834.985.801,82)	(120.082.987.846,95)	(20.751.997.954,87)	17,28
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(281.669.971.603,64)	(240.165.975.693,90)	(41.503.995.909,74)	17,28

Banjarbaru, 31 Desember 2017
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

Ir. JAYA KRESHNA
NIP. 19631105 199302 1 002